akar perlawanan rakyat

timor timur masa kini dan prospek bagi perdamaian

kata pengantar Ign. Sandyawan Sumardi, SJ

Gerry van Klinken

elsam

UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA
1956

Akar Perlawanan Rakyat Timor Timur, dan Prospek Perdamaiannya

Gerry van Klinken

Akar Perlawanan Rakyat Timor Timur dan Prospek Perdamaiannya

Kata Pengantar:
Ign. Sandyawan Sumardi, SJ

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM)
1996

Judul Asli: The Contemporary Roots of East Timor
Resisitance, and Prospects for Peace
Hak cipta oleh: Gerry van Klinken
Kata Pengantar: Ign. Sandyawan Sumardi, SJ

Naskah ini pernah dibawakan dalam "East Timor Consultation Held" di Hongkong, 12-15 Desember 1994.

Hak Cipta edisi Indonesia: ELSAM

Cetakan Pertama: Juli 1996

Kulit Muka: Gendut B. Riyanto

Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM)
Jl. Kampung Melayu Besar No. 44
Jakarta Selatan
Telp. 8296905, Facs. 8353690,
E-mail: ELSAM @ Nusa.or.id

Kata Pengantar

Radikalisme, Resistensi dan Perdamaian

Ign. Sandyawan Sumardi, SJ

Suara dari Penjara

Penjara memang telah mengajarkan kearifan kepada para pejuang. Dan radikalisme ternyata punya daya pikat yang magis, justru dalam kesunyian bui tanpa tangis, di arena *bezoek*, siang yang lengang, Cipinang, Minggu 12 Mei 1996. Rupanya ada "pesta demokrasi" kecil di sana. Xanana Gusmao (CNRM), Ahmad Taufik bin H. Abubakar, Eko *Item* Maryadi (AJI), serta Tri Agus dan Nuku Sulaiman (PIJAR) tengah berpeluk-pelukan dengan para sahabat prodemokrasi yang mengunjungi. Gelora solidaritas sejati dan perdamaian seperti sedang diikrarkan dalam sunyi. Dan ketika putri kecil Ahmad Taufik tengah asyik mengunyah sepotong bolu manis dalam pelukan kekar Xanana Gusmao, terngiang dalam batin ini, kalimat-kalimat sempalan pledoi Xanana yang gelisah mendakwa:

> "...Keadaan saya sendiri... di mana segala gerak-gerik saya dikontrol luar biasa ketatnya, mengingatkan saya pada pengontrolan total terhadap penduduk Dili dan terutama terhadap para pemuda Timor Timur yang heroik, yang diberlakukan segera sesudah pembantaian massal yang pengecut di Santa Cruz... Di Polwil, di mana mereka berusaha

merayu saya dengan perhatian yang berlebihan, terdapat tulisan-tulisan inskripsi yang ditoreh dan digurat pada dinding-dinding sel tahanan, oleh para tahanan dan kawan-kawan yang mendampingi saya. Tulisan-tulisan itu demikian menggoreskan kenangan saya pada derita mendalam yang ditanggung oleh banyak kawan-kawan seperjuangan saya. Mereka semua adalah segala korban dari segala jenis penyiksaan, yang juga tetap mengingatkan saya kembali pada hari 12 November 1991 yang tak terlupakan itu. Gelora kehendak jenis apa yang ada dalam demonstrasi damai pada 12 November 1991 itu? Mengingatkan Jakarta dan Dunia, akan betapa perlunya dialog perdamaian, mengingatkan Jakarta dan dunia, bahwa telah terjadi sesuatu yang sudah sedemikian parah bersalah di Timor Timur....". (*Kutipan dari Pidato dan Ringkasan Pembelaan Xanana Gusmao*).

"Land of the Disappeared"

Dalam tradisinya sejak orde baru berdiri, pembicaraan tentang Indonesia biasanya berkisar pada perkara-perkara yang menyangkut masalah dalam negeri dan lebih dalam lingkup internal. Gelagat semacam itu kurang lebih berubah secara signifikan pada tahun 1992. Secara tak terelak Indonesia semakin harus mempertimbangkan kaitan dan gambaran real kondisi rakyat dan negara yang ditangkap oleh komunitas internasional. Faktor penentu dari perubahan *trend* itu adalah pertalian antara perhatian komunitas internasional yang semakin besar pada

masalah hak-hak asasi manusia dan implikasi semakin masuknya ekonomi Indonesia ke jaring sistem ekonomi dunia. Misalnya, dering tragedi Santa Cruz, Dili di tahun 1991 itu, tentu keras untuk tidak terdengar oleh komunitas internasional.

Andaikan tersedia indikasi kasar dan dalam bentuk statistik mengenai pembengkakan jumlah pengaduan dan protes massal atas jatuhnya korban-korban kekerasan politis di Timor Timur, tentu pemaparan ini setidaknya akan kurang menderita tuduhan sebagai taksiran imaginer. Tetapi orang juga hanya butuh beberapa detik untuk mengingat kembali peristiwa pembantaian massal (lebih dari 50 korban?) di pemakaman Santa Cruz di Dili, 12 November 1991, atau pembantaian 6 warga sipil dalam peristiwa Liquica, 10-12 Januari 1995, (di penghujung kasus Liquica ini Gerry van Klinken menyelesaikan penulisan buku ini) untuk melihat contoh dari *modus* pembantaian yang dipakai. Andaikan ada pun, angka-angka itu selalu butuh penambahan 50%-100% untuk mendekati angka sebenarnya.

Tapi di antara kedua Insiden besar itu, tercatat 23 insiden lain yang terjadi di Timor Timur, atau yang melibatkan warga Timor Timur, yang walaupun kecil, tetap menjadi batu kerikil yang sangat mengganggu. Demikianlah, dalam kurun sepuluh tahun terakhir ini penangkapan, pemenjaraan, penganiayaan, pelenyapan tiba-tiba, pembunuhan, telah menjadi bagian dari peristiwa sehari-hari rakyat Timor Timur. Kuburan-kuburan massal yang dirahasiakan seakan

telah membuat Timor Timur kini menjadi "*land of the disappeared*", negeri yang tengah dilenyapkan.

Sejarah Perlawanan

Kurang lebih 455 tahun Portugis menguasai daerah jajahan Timor Timur. Ketika MFA (*Movimento das Forces Armada*), perwira muda militer Portugal berhaluan kiri, melakukan kudeta terhadap Diktatur Caetano pada tahun 1974, proses dekolonisasi pun dimulai. Namun proses dekolonisasi yang tak kunjung usai ini sempat terhenti karena percaturan politik di dalam negeri Timor Timur dan campur tangan pemerintah Indonesia. Stagnasi proses dekolonisasi terjadi, karena persaingan-persaingan politik di antara partai-partai yang lahir setelah kudeta, dan kepentingan-kepentingan geopolitik negara-negera tetangganya (Indonesia dan Australia) yang berada di bawah bayang-bayang politik perang dingin (percaturan politik antara negara-negara liberal versus negara komunis), paling tidak telah memberi andil bagi diingkarinya keingingan negeri ini di bawah kaki gunung Ramelau ini untuk merdeka.

Ada tiga partai yang muncul setelah pengumuman pemerintahan baru di Portugal itu, yang mempunyai orientasi politik yang berbeda akan masa dengan Timor Timur, yaitu UDT (*Unio Demoractica de Timor*), FRETILIN (*Frente Revolucio de Timor Leste Independento*) dan APODETI (*Associacoa Populer Democratica de Timor*). Manuver politik ketiga partai ini untuk

meraih kekuasaan pasca-dekolonisasi, berakhir dengan masuknya angkatan bersenjata Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975 ke wilayah Timor Timur. Keabsahan campur tangan pemerintah Indonesia ini dinyatakan dalam apa yang disebut "Deklarasi Balibo', yang ditandatangani oleh pimpinan-pimpinan partai APODETI, UDT, KOTA (*Klibur Oan Timor Asuain*), dan TRABALIHISTA (Partai Buruh). Sampai akhirnya, pada 17 Juli 1976, Timor Timur dinyatakan menjadi provinsi keduapuluh tujuh Indonesia.

Sejauh ini, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tidak pernah mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah ini. FRETILIN yang secara unilateral telah memproklamasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Timor Timur (RDTT) melanjutkan perjuangan bersenjata melawan pernyatuan (integrasi) itu di bawah pimpinan Nicolau Lobato. Perlawanan secara militer ini hanya bertahan selama tiga tahun 1976-1979), Selanjutnya (tahun 1981) di bawah kepimpinan Kay Rala Xanana Gusmao FRETILIN terpaksa mengubah strategi perlawanannya, yaitu melalui perang gerilya (*hit and run*) dan politik-diplomasi yang dengan trampil dijalankan oleh Jose Ramos Horta. Di samping itu, Xanana juga merubah orientasi politik semula FRETILIN untuk menarik semua kelompok masyarakat Timor Timur, yang kemudian berhasil melahirkan apa yang disebut "*Convergencia Nacional*", yang mempersatukan kembali UDT dan FRETILIN di luar negeri untuk melanjutkan perlawanan. Kedua partai ini sering bekerja sama

dalam perundingan-perundingan dengan pemerintah Portugal, dan dalam menghadapi forum-forum pertemuan PBB.

Xanana Gusmao pada tahun 1988 menyatakan keluar dari Fretelin, dan menarik sayap gerilyanya, Falentil, dan partai FRETILIN. Strategi gerakan perlawan pun mengalami perubahan radikal. Xanana kemudian mempersatukan seluruh kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan di bawah bendera CNRM (*Concelho Nacional do Resistencia Maubere* - Dewan Perlawanan Rakyat Maubere), dan pimpinan tetap berada ditangannya sampai akhirnya dia ditangkap oleh angkatan bersenjata Indonesia. Dengan keluarnya Xanana tidak berarti FRETILIN dan Falentil bubar, melainkan bersama-sama organisasi bawah tanah (*clandestine*) yang beroperasi di Timor Timur maupun di Indonesia, serta anggota partai politik lain yang memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur seperti UDT (yang kini banyak beroperasi dari basis-basis mereka di Australia, Macao, dan Portugis), semuanya sekarang menjadi anggota CNRM. Lewat organisasi payung inilah, pada bulan Mei 1992, Xanana menawarkan sebuah proposal bagi perdamaian Timor Timur yang disampaikan oleh juru bicara CNRM Jose Ramos Horta kepada pejabat-pejabat tinggi sekretariat PBB di New York.

Setelah Xanana tertangkap, pucuk pimpinan organisasi payung ini kini beralih ke tangan sebuah "troika" (*triumvirat*) yang terdiri dari front bersenjata (*frente armada*), Nino Konis Santana,

yang berbasis di hutan pengunungan Timor Timur, pimpinan front politik diplomatik (*frente politic-diplomatics*), Jose Manuel Ramos Horta, yang berbasis di Australia, serta pimpinan front klansdestin (*clandestine*) yang disembunyikan identitasnya. Di bawah bendera CNRM inilah, yang ternyata mendapat dukungan luas dari kalangan muda masyarakat Timor Timur (di luar dan dalam negeri), perlawanan terhadap integrasi terus berlanjut baik secara damai (demonstrasi) maupun bersenjata. (Team ELSAM, "Ragam Penyiksaan oleh Pejabat Publik: dari Aceh hingga Dili, Kasus 10" dalam *Kearah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan*, ELSAM, Jakarta, 1995.).

Sejarah dari Bawah

Dalam kasus Timor Timur seperti di atas itulah kelemahan historiografi kita. Sejarah terlalu mengandaikan bahwa waktu merupakan arena lompatan-lompatan linear dari berkah peradaban. Pada hal para "pemegang sejarah" (dan para sejarawan) biasanya begitu mahir mengubur penderitaan massal 'tradisi kecil' yang dianggap remeh-temeh di kaki momentum-momentum besar peristiwa dan kemenangan superfisial. Entah ia berupa angka pertumbuhan ekonomi yang menawan ataupun tahap lepas landas. Kalaupun sebagai agregat ia merupakan lompatan seturut hukum-internal ilmu ekonomi (pertumbuhan), hampir pasti disembunyikan beberapa titik gelap yang jarang diketahui karena digelapkan. Entah itu peristiwa atau angka yang lahir dari hukum-internal

ekonomi sendiri.

Seperti sudah disebut, cerita sukses menawan. Tetapi ia juga sebuah model historiografi yang bukannya tidak menyandera banyak peristiwa yang diam-diam memukul massa. Itulah bentuk kudeta historiografi "*tradisi besar*" yang senantiasa berulang terhadap perjalanan massa. Terhadap gejala seperti itu, Moore, Jr (1966) dalam surveinya, setiap murid yang waras, cepat atau lambat, tak mungkin bisa mengelak dari penemuan bukti yang sangat menggelisahkan. Demikian lantaran setiap perayaan atas kegagahan tampan dengan menyembunyikan luka-lukanya akan selalu tetap berstatus sebagai apologi, bahkan jika semua itu dipamer-usahkan dalam bahasa yang paling akademis sekalipun. Timbangan skeptis semacam itu seharusnya menjadi keniscayaan epistemo metodologis setiap historiografi, karena:

> "Dalam masyarakat manapun, kelompok-kelompok dominan adalah kelompok paling menyembunyikan mekanisme bagaimana masyarakat sesungguhnya berlangsung. Karena itu, laporan yang jujur selalu akan kedengaran sebagai dering peringatan yang kritis, dan selalu akan kelihatan sebagai penelanjangan ketimbang sebagai pernyataan obyektif.." (Berrington More, Jr., *Social Origins of Dictatorship and Democracy*, New York: Pinguin, 1966, hal. 522-523).

Membongkar Premis-premis Konvensional

Adalah naif membaca fenomen perlawanan

rakyat Timor Timur sejauh ini hanya dengan mengasalkan pada premis bahwa kasus Timor Timur merupakan suatu kasus dekoloniasasi (oleh Portugal) yang tidak selesai, atau sebuah peristiwa aneksasi (pencaplokan) paksa oleh pemerintah Indonesia terhadap suatu negara bangsa yang berdaulat, apalagi sekedar suatu kasus pemberontakan atau separatisme. Premis demikian menurut Gerry van Klinken kurang menghormati gejala tersembunyinya, yaitu bahwa kasus Timor Timur dalam proses historisnya lebih merupakan gejala kultural. Sebagai sebuah gejala kultural, kita jumpai dua kecenderungan sekaligus: perlawanan lebih merupakan nama simbolis dari berbagai lapis realitas kultural yang sangat heterogen, tetapi sekaligus sebuah bingkai interpretasi sosial-politis yang homogen dengan sistem hegemoni yang telanjang.

Dengan mengalihkan perhatian kita pada faktor-faktor masa kini, Gerry tidak bermaksud menegasi argumen-argumen hukum dan historis, serta ketidakadilan masa lalu yang pasti membawa dampak derita lanjut pada rakyat Timor Timur masa sekarang. Menurut Gerry, ada sebuah nilai lebih yang dapat kita raih dengan lebih memandang Timor Timur sebagai sebuah kasus "separatisme" dengan akar masa kini, ketimbang premis-premis konvensional yang selama ini banyak dikemukakan, yang tak pernah jelas dampaknya bagi prospek perdamaian di Timor Timur sendiri. Salah satu alasan kuat untuk menggunakan pendekatan baru ini adalah alasan heuristik yang jelas: kita mungkin dapat mencapai wawasan baru

dengan menunda untuk sementara waktu sudut pandang historis untuk kepentingan suatu analisis yang lebih baru. Lebih penting lagi, pendekatan ini memungkinkan kita untuk membuka suatu dialog dengan banyak pelaku dan komentator (rakyat Timor Timur, para pemimpin CNRM, pemerintah Indonesia, para wartawan asing, masyarakat internasional, PBB, dsb.).

Gerry dalam tulisannya ini telah berikhtiar untuk membedah jargon-jargon anakronisme historis dalam konteks perkara Timor Timur yang biasanya secara konseptual tidak jelas, seperti kata "separatisme". Dan lebih menarik lagi adalah ulasan ringkas bersahaja dari Gerry tentang solusi pemecahan perkara "separatisme" itu sendiri. Dengan cukup jernih Gerry membongkar asumsi-asumsi dasar di seputar persoalan: pemisahan, otonomi dan asimilasi.

Ideologisasi, Regimentasi dan Hegemoni

Diam-diam kini kita sedang dipaksa untuk berhadapan dengan teka-teki sebuah ideologi (setidaknya dalam pengertian Marxis): menyelinap secara diam-diam, baik dari daratan empiri maupun daratan logika. Ia tidak hanya meniscayakan berbagai teknik dusta, tetapi juga jika sanggahan empiri yang terang-benderang tak mungkin bisa disembunyikan lagi, ia harus menciptakan teknik psikologis khusus untuk mencegah para penganutnya melihat fakta. Dalam arti ini, tugas ideologisasi adalah memformat pikiran rakyat sedemikian rupa sehingga mereka

mencegah diri dari mengenali bahwa aneksasi paksa itu inheren dalam tingkah-laku dari para pelaku kekuasaan juga.

Tetapi mengapa kelugasan cara pandang seperti itu tidak mungkin muncul secara resmi? Ini sama dengan mempertanyakan: Mengapa garis pemaknaan ideologi berada pada "sabda" dari satu atau kelompok atau partai yang memonopoli? Salah satu jawabannya mungkin baik dicontohkan dari model dusta yang dengan sempurna dilakukan *Marxisme-Leninisme*. Menurut cara dusta model itu, kebenaran dapat dilihat hanya dari posisi tertentu kelas progresif, yaitu kaum proletar. Padahal kebijaksanaan agung kaum proletar itu tersimpan di Partai Komunis, dan tentu bukan pada apa yang sesungguhnya dipikirkan atau dirasakan para buruh yang setiap hari berkeringat di pabrik-pabrik. Maka, produsen kebenaran sejati adalah Partai Komunis. *Ergo*, partai tidak pernah salah karena inilah mekanisme tunggal untuk memperanakkan kriteria validitas kognitif.

Silahkan ganti istilah 'partai' dengan 'Golongan' apa saja yang mungkin lebih relevan, dan istilah 'proletariat' dengan 'Persatuan' apa saja. Hasilnya sama: kebiasaan dusta untuk menggelapkan fakta empiris yang terang-benderang telah membuat ideologi menjadi sangat kikuk dan selalu gagap berhadapan dengan suara rakyat yang senantiasa baru. Mantra resmi "pembangunan" dan "stabilitas" yang sudah lebih dari 20 tahun didaraskan terus-menerus, misalnya, begitu gugup menghadapi keniscayaan suara "demokratisasi" dan "hak-hak

asasi" yang makin tegas selama 5 tahun terakhir ini.

Adakah semua ini dapat kita baca secara spekulatif, bahwa dewasa ini tengah terselenggara suatu kemajuan substansial dalam praktek keterbukaan politik Indonesia? Tak perlu kita bergegas untuk percaya. Sebelum kita terjebak pada sebuah spekulasi politis tanpa dasar peta "*real politics*" yang meyakinkan, baiklah kita menyadari bahwa soal utama pembangunan politik orde baru masih belum juga dari kenyataan piramidal: ketangguhan Orde Baru untuk berkuasa terus-menerus. Sebutlah kenyataan politik ini sebagai *regimentasi*: strategi dasar Orde Baru dalam menjalankan dan mengendalikan politik secara lengkap, sistematik, sentralistik, dan dengan itu membangun legitimasinya.

Secara pragmatis Orde Baru adalah sebuah konstruksi kekuasaan yang dibangun atas dasar uang minyak, hutang luar negeri dan yang penting kepatuhan militer. Secara ideologis Orde Baru adalah sebuah konstruksi psikis yang dengan sengaja terus-menerus memelihara alam bawah sadar traumatiknya. Pemberontakan komunis (akhir-akhir ini gerakan Teologi Pembebasan pun sering diidentikan dengan komunis), demokrasi liberal, gerakan separatis dan negara Islam. Melalui kombinasi prestasi ekonomi dan trauma historis inilah Orde Baru senantiasa mencapai legitimasinya. Dan legitimasi ini dikawal secara ketat dan diamankan stabilitasnya secara sistematis melalui rangkaian stategi rejimentasi (pembatasan partai, litsus calon anggota parlemen, larangan oposisi,

indoktrinasi ideologi dan teknik intelejen lain). Demikianlah hegemoni Orde Baru sama sekali tidak dicapai melalui sesuatu "*war of position*" yang terbuka dalam rangka suatu demistifikasi, melainkan sebaliknya dimenangkan oleh indoktrinasi dan represi. Yang paling berbahaya adalah penyeragaman pikiran berdasarkan indoktrinasi itu (totalitarianisme).

Gerakan Arus Bawah

Setidaknya ada 2 pola besar dari gejala berbagai protes massal, pemogokan, demonstrasi dan pengaduan yang makin jelas manandai horizon politik di Indonesia belakangan ini.

Pertama, protes terhadap pemberangusan kebebasan politis dan hak-hak sipil. Sasaran protesnya adalah kesewenangan birokratis, seperti penyalahgunaan otoritas, kolusi, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dll. Protes jenis ini sangat penting untuk kita kenali karena menyangkut rontoknya kepercayaan rakyat terhadap lembaga-lembaga publik, seperti seluruh mafia lembaga peradilan, militer dan eksekutif.

Kedua, lebih luas dan signifikan adalah protes massal dalam bentuk pemogokan serta demonstrasi pengaduan. Dengan jumlah tambah 100% per tahunnya, pemogokan dan unjuk rasa buruh dan kaum pinggiran lain ini menjalar semakin luas dan terus meledak di hampir semua kota industri, seperti Tangerang, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Ujung Pandang, Medan, dll. Sesudah peristiwa pemogokan besar

Gajah Tunggal yang melibatkan 14,000 buruh (Agustus 1991), rentetan mogok massal yang melibatkan ribuan buruh-buruh menyengat pusat-pusat industri manafaktur ekspor itu. Faktor pemicu terbesar (lebih dari 70%) dari pemogokan-pemogokan itu begitu elementer dan sangat "*primitif*", yaitu rendahnya upah. Sedangkan protes pengaduan biasanya datang dari para petani, buruh, penduduk yang kena gusur dan berbagai kelompok kaum pinggiran lain. Penggusuran dan masalah pengambilan tanah untuk bisnis dan tujuan lain sudah menjadi soal yang sedemikian besar sehingga hampir tak ada hari tanpa peristiwa pengaduan petani, buruh dan kelompok tergusur lain ke DPR, MA, Wali Kota, Gubernur, dan instansi-instansi lain.

Dalam konstruksi analitis, kaitan atau (lebih tepat) titik temu dari 2 pola protes yang semakin meluas tersebut menyangkut gambaran mengenai hubungan antara *negara* dan *masyarakat*. Gambaran klasik "Timur" bahwa masyarakat dan negara merupakan satuan dan unsur yang saling meleburkan diri satu-sama lain barangkali lebih merupakan rekaan ketimbang kenyataan, karena kilatan-kilatan gejalanya makin menunjukkan bahwa keduanya terpisah. Bahkan makin lama semakin bersifat antitetis. Dalam skala kolektif, luasnya protes massal itu mengisyaratkan terjaganya rakyat dari *anesthesia* (bius) yang selama ini menghasilkan ilusi kolektif tentang negara sebagai penjaga dan penyelenggara kesejahteraan. Soal ini sentral, karena menjadi salah satu proses penting

bagi terbangunnya kaum pinggiran dari rasa ke-tak-terelak-an (*inevitability*) perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh aparat negara atau sepadan terhadap mereka. Dalam skala besar, itulah protes bagaimana rasa keadilan dan *moral outrage* terbentuk, entah dalam rangka klaim *hak* (dalam terminologi modern), atau dalam rangka *resiprositas* (dalam terminologi tradisional).

Paradigma Gerakan Resistensi

Di bawah lapisan semakin maraknya gerakan protes massal, pemogokan, demonstrasi, dan pengaduan dari kaum tergusur, kaum buruh, mahasiswa, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan birokratis (penyalahgunaan otoritas, kolusi, penggelapan fakta, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, teror dengan kekerasan) yang dewasa ini kian menemukan momentumnya di negeri ini, rupanya hidup dan berkembanglah gerakan-gerakan resistensi arus bawah secara sporadis yang demikian spontan, alamiah dan halus. Gerakan-gerakan resistensi yang lahir dari kantung-kantung basis gerakan prodemokrasi ini sungguh sukar dideteksi dengan hanya berdasarkan logika dan parameter orang sekolahan saja, terutama dalam hal kepemimpinannya, struktur dan dinamika organisasinya, serta ideologinya.

James C. Scott dalam bukunya "*Wweapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*" (1985) bahkan berani menyimpulkan bahwa protes yang terselubung dan simbolis dari rakyat biasa ini

merupakan "naskah tersembunyi" (*hidden transcript*) yang membentuk genangan luas *infra-politics*. Massa pinggiran merupakan pelaku dan warga utama republik *infra-politics* ini. Hanya karena politik elite begitu keras-kepala, maka *infra-politics* ini tak pernah diakui sebagai bagian konstitutif dari dunia politik. Tetapi penolakan semacam itu juga tidak pernah mencegah keberadaan faktual-nya. Sebagai gejala politik, kemarahan moral ini mengacu pada cara bagaimana kekuasaan dari otoritas politik dan ekonomi dijalankan, dan karenanya punya korelasi dengan masalah legitimasi yang dinikmati atau diderita oleh setiap regim. Karena itu, legitimasi pada taraf yang terdalam memang bersifat psikologis, bukan hukum.

Kekuasaan dan penguasaan dalam arena percaturan politik, cenderung menghasilkan suatu penyimpangan fundamental terhadap kemampuan-kemampuan ekspresi alamiah manusia. Kekuasaan dan penguasaan dalam sejarah, selalu akan menghasilkan perpecahan antara "naskah publik", yaitu interpretasi yang diungkapkan secara terbuka mengenai hubungan antara yang berkuasa dengan yang dikuasai - dan "naskah tersembunyi" yang menggambarkan dan terkadang sekaligus melambangkan kritik-kritik halus dan nyaris tersembunyi mengenai kekuasaan. Yang terakhir ini, sejalan dengan sifatnya, hanya dilontarkan atau diterjemahkan secara diam-diam ke dalam perbuatan, atau dalam alam pribadi. Mereka yang dikuasai (baca: para penentang kekuasaan) cenderung menciptakan dengan

sendirinya suatu wacana samar yang lokasinya, baik secara ideologis maupun geografis, jauh dari arena percaturan politik utama, dari jangkauan atau pengawasan yang berkuasa.

Gerakan-gerakan resistensi solidaritas rakyat sebagai bagian dari gerakan massa mengambang yang kini kian meningkat dalam masyarakat kita dewasa ini merupakan gejala universal di zaman modern ini. Dunia kita mengenal adanya berbagai revolusi yang digerakkan oleh agama, nasionalisme, atau kekuatan-kekuatan sosial-politis yang menuntut reformasi, kemerdekaan, keadilan, peningkatan serta jaminan martabat dan harkat manusia secara individual maupun komunal. Menurut Eric Hoffer dalam bukunya "*The True Believer*" (1951) semua gerakan massa, tak perduli apapun sifatnya (agamawi, rasial, sosial, nasionalistis atau ekonomis), juga tak peduli apapun tujuannya, senantiasa memiliki sekelompok karakteristik yang sama: semuanya mampu membangkitkan pada diri para pengikutnya kerelaan untuk berkorban sampai mati; kecenderungan untuk beraksi secara kompak; fanatisme, antusiasme, harapan yang berapi-api, kebencian dan intoleransi, kepercayaan buta, dan kesetiaan tunggal. Semua gerakan massa, betapapun berbeda dalam doktrin dan aspirasinya, akan cenderung menarik pengikut-pengikutnya yang pertama dari satu jenis manusia, yakni manusia-manusia yang kecewa, tidak puas dan frustrasi.

Gerakan resistensi merupakan cara kaum tertindas untuk bertahan, melawan dan sesekali

mendobrak hubungan-hubungan subordinasi yang mengungkungnya. Gerakan resistensi adalah cara menciptakan ruang gerak sosial, merakit ideologi-ideologi alternatif, mengembangkan suatu sub-budaya ketidaksepakatan, menggalang solidaritas teman senasib-seperjuangan, dan mengasah teknik serta bentuk-bentuk perlawanan tidak langsung, seperti mencuri barang milik sang penguasa, kaum sektor informal yang mendayagunakan tanah-tanah negara secara sporadis-ilegal, menghindari pajak, mengedarkan selebaran gelap, memanfaatkan anonimitas kerumunan massa untuk menutupi aksi-aksi pemberontakan, menceritakan dongeng rakyat tentang penipu-penipu pahlawan yang selalu berhasil memperdayakan sang empunya kekuasaan, atau mentrasformasikan upacara dan acara-acara ritual yang "diperbolehkan" seperti karnaval menjadi demonstrasi, suatu ekspresi oposisi terhadap sistem dominasi dan hegemoni kolusi para penguasa.

Pada intinya manusia di mana dan kapan saja mempunyai sifat dasar yang sama dan tidak bisa diganggu gugat: dalam relung hati paling dalam, sekurang-kurangnya, mereka tidak bisa menerima suatu perlakuan semena-mena yang dipaksakan terhadap mereka oleh sesama manusia atau, suatu hubungan dimana ketidakadilan, penginjakan hak asasi manusia atau kekerasan fisik melulu menjadi bagian mereka.

Kaum tertindas umumnya tidak menghadapi pilihan hitam putih antara revolusi atau pemberontakan dan suatu "penerimaan" yang telah

dihayati luar-dalam atas formalitas suatu sistem atau hubungan kekuasaan. Yang biasanya terjadi adalah kaum tertindas memilih "berjuang" secara kolektif, tanpa nama, dan terus menerus. Bentuk paling jelas strategi perjuangan ini tidak lain apa yang sekarang secara universal disebut "aksi massa." Dari segi keamanan, ide untuk melembagakan oposisi dan menjadikannya suatu unit perjuangan yang permanen, hierarkis, dan sarat struktur sama sekali bertentangan dengan logika subordinasi gerakan resistensi.

Kebanyakan politik kerakyatan yang menunjang aksi massa pada umumnya lahir dari konteks historis dimana gerakan-gerakan oposisi permanen memang mutlak tidak strategis. Jadi, aksi-aksi kolektif jangka pendek sering berhasil justru karena artibut "kesementaraan"-nya.

Memang harus diakui bahwa ada pertimbangan-pertimbangan realistik dari pihak kaum tertindas apabila mereka memilih untuk diam atau menunjukkan sikap *nrimo*. Sebab intimidasi, pengalaman-pengalaman pahit kekerasan, paksaan atau hukuman fisik, dlsb., itu sendiri semuanya mempunyai potensi memperlemah semangat perlawanan. Banyak sistem dominasi menciptakan dengan sendirinya sebuah budaya "takluk dan non-partisipatif" melalui kontrol atas lembaga-lembaga media massa atau perguruan tinggi. Pada intinya, wadah-wadah yang dikuasai ini sering sedemikian rupa diubah menjadi kepanjangan tangan sang penguasa. Tugasnya tidak lain adalah untuk mengekalkan semua gambaran, legitimasi, kesan, dan keyakinan-keyakinan yang mendukung

keabsahan sang empunya kekuasaan.

Tetapi, ketidakberanian melawan bukan berarti penerimaan. Kalau kita berkonsultasi dengan para antropolog sosial, kita akan menemukan cara-cara pendekatan psikologi sosial dalam memahami sebab-sebab manusia melawan. Salah satunya adalah keyakinan bahwa manusia mempunyai suatu kebutuhan dasar akan otonomi dan kebebasan yang apabila dirintangi akan berubah menjadi suatu reaksi oposisi atau penentangan radikal.

Kriteria Pembangunan

Mitos pertumbuhan sebagai alibi bagi kesenjangan yang tajam sama tersesatnya dengan mitos revolusi sebagai alibi bagi tirani. Tetapi, konstatasi tersebut juga mengandung sebuah pertanyaan mendasar: dalam rangka keadilan sebagai buruan tanpa akhir, kriteria apa yang paling tidak harus inheren dalam pembangunan? Mungkin dalam hal inilah kita terpaksa kembali lagi menjadi skeptis di antara sekian banyak prediksi.

Di hadapan susah-payah empiris semacam itu, biasanya "ilmu kegenitan", ada yang berstatus sebagai pengganti rasa jijik terhadap kekumuhan, dan ada yang dalam rangka bisnis otonomi atau gagasan. Tetapi ada juga yang muncul sebagai bagian dari kejujuran pencarian, dan biasanya selalu berupa timbangan prinsip penuntun.

Dalam kaitannya dengan syarat keadilan sosil, satu di antara sekian banyak yang layak kita simak adalah refleksi Peter L. Berger. Ia mengusulkan 2

macam "kalkulus" untuk melihat apakah sebuah pembangunan sungguh berhasil dan menjawab prinsip keadilan. Yang pertama adalah 'kalkulus beban' (*calculus of Pain*), yaitu pencegahan penderitaan paksa, dan yang kedua ialah 'kalkulus kebermaknaan' (*calculus of meaning*) sebagai penghargaan terhadap nilai-nilai hidup dari para warga yang dimaksud oleh kebijakan-kebijakan pembangunan. Untuk itu, Berger mengajukan 3 kriteria keadilan yang harus dikenalkan pada setiap model dan proyek pembangunan:

> "Pertama, pembangunan yang berhasil mensyaratkan kemajuan ekonomi yang berlanjut dan self-generating. Kedua, pembangunan yang berhasil mensyaratkan gerakan berlanjut dalam skala luas oleh penduduk kebanyakan, dari kondisi kemiskinan yang akut ke standar hidup yang layak secara manusiawi. Ketiga, pembangunan tak dapat dikatakan berhasil jika prestasi-prestasi dari kemajuan ekonomi dan pembagiannya berlangsung di atas pelanggaran hak-hak asasi manusia." (Peter Berger, "Underdevelopment", *Commentary*, vol.78, no.1, July 1984, hal. 41-45).

Di bawah terang prinsip dan kriteria semacam itu, segera kelihatan bahwa bagi komunitas-komunitas rakyat, pembangunan lebih sering dialami sebagai beban (dalam *calculus of pain*), dan karenanya lebih sering tidak bermakna (dalam *calculus of meaning*). Dan dalam pengalaman mereka, pembangunan lebih punya arti sebagai

penggusuran (*displacement*). Selain sangat mahal, pembangunan yang lebih sering dialami sebagai penggusuran itu juga menyimpan kemarahan luas rakyat yang nampak dalam berbagai protes-protes terhadap ketidakadilan.

Gerakan Solidaritas demi Perdamaian

Justru dalam masyarakat kita dewasa ini yang semakin menjadi masyarakat semi industri dengan karakteristik-karatestik sosialnya yang nampak pada wajah mekanisme produksi masal, rasionallisasi, efisiensi, impersonalisasi, alienasi dan dehumanisasi, ternyata "solidaritas" telah menjadi semacam ideologi atau bahkan agama baru bari rakyat kecil. Dalam jaringan solidaritas basis-basis rakyat yang akhir-akhir ini semakin tumbuh subur, nampaklah betapa "*sense of survival*" dan "*monitoring system*" kaum miskin tentang bahaya yang mengancam di sekelilingnya sangatlah tinggi. Sebaliknya kaum kaya bercokol justru cenderung lengah. Semakin tinggi kekuasaannya, semakin besar pula besar presentase kelengahannya. Solidaritas kini semakin nyata bukan sekadar sikap belas kasihan, malainkan telah menjadi bentuk resistensi dan pembelotan budaya atau bahkan perlawanan bagi teror mitos-mitos elitisme pembangunan yang dewasa ini semakin merajelela alam masyarakat kita. Justru ketika hak dan martabat rakyat kecil semakin diabaikan dan digusur, semakin berkembanglah solidaritas mereka, dalam bentuk gerakan-gerakan sosial alternatif. Rupanya solidaritas akhir-akhir ini telah

menjadi tekad bagi kelompok-kelompok kaum miskin tertindas untuk bergabung dan bersatu guna menuntut hak-hak mereka yang sah.

Secara prinsipial, "solidaritas demi perdamaian" adalah kesanggupan untuk berjuang bagi semua orang. Dalam praktek, "solidaritas demi perdamaian" adalah kata lain dari kasih, yang menggerakkan kaki, tangan, hati, seluruh kepribadian manusia. "Solidaritas demi perdamaian" adalah gerakan availibitas manusia dari kemapanan menuju tempat-tempat yang terasing dan sudut-sudut kegelapan masyarakat di mana terdengar jerit kesakitan, kesepian, ketidakadilan, penggusuran, penindasan dan kematian sesamanya. Tujuan "solidaritas demi perdamaian" adalah berbagai kehidupan dengan sesama yang menderita, dan menolong kebangkitannya untuk memperoleh kebebasan, keadilan dan hak serta martabatnya. "Solidaritas" adalah perubahan sikap hati dalam diri orang yang berkuasa untuk melawan keserakahan akan keuntungan, yang mengingkari kehausan akan kuasa, dan melibatkan diri pada kepentingan sesama. "Solidaritas demi perdamaian" tidak sama begitu saja dengan persaudaraan semua orang. Solidaritas mereka yang tersisih, bagi mereka yang tersisih, untuk mengubah segala yang tidak adil. Kini "solidaritas" bukan hanya gerakan penggugah, tapi gerakan penggugat. "Solidaritas demi perdamaian" rakyat adalah mesiu yang ditumpuk-tumpuk lama, yang sewaktu-waktu dapat meledak, manakala ada pijar api yang menyulutnya, entah sengaja atau tidak, entah dari

mana asalnya, entah bagaimana caranya. "Solidaritas demi perdamaian" adalah kekuatan utama kaum tertindas.***

Jakarta, 18 Juli 1996
I. Sandyawan Sumardi, SJ

Daftar Isi

Kata Pengantar i

Daftar isi xxv

I. Mengapa Separatisme Timor Timor 1

II. Separatisme di Asia Tenggara 8
Kondisi Sosial 8
Kondisi-Kondisi Ekonomi 14

III. Pemecahan Masalah Separatisme 19
Pemisahan 19
Otonomi 22
Asimilasi 29
Represi dan Banjir Demografi 34

IV. Prospek Bagi Perdamaian 36
Liku-Liku Politik dalam Negara Otoriter 36
Menjadikan Represi Sesuatu Yang Mahal 37
Mendengar Suara Timor Timur 38
Patner Berunding Dari Indonesia 40

V. Kesimpulan 45

I. Mengapa "Separatisme" Timor Timur?

Perlawanan berkelanjutan terhadap kekuasaan Indonesia di Timor Timur merupakan manifestasi luar dari sebuah masalah serius. Tetapi penting bagi kita untuk menjawab pertanyaan: "Termasuk kasus apa perlawanan rakyat Timor Timur ini?" Di sini saya akan mengemukakan alasan bahwa ada sesuatu yang dapat dicapai dengan lebih memandang Timor Timur sebagai suatu kasus separatisme dengan akar masa kini, ketimbang (seperti dilakukan oleh kebanyakan pengamat) sebagai suatu kasus perlawanan terhadap aneksasi (pencaplokan) tahun 1975. Analisis itu mempunyai akibat penting bagi prospek perdamaian di Timor Timur.

Pada mulanya, perlawanan rakyat Timor Timur sebenarnya adalah suatu kasus perlawanan terhadap pencaplokan paksa. Pada tanggal 7 Desember 1975. Ketika pemerintah Timor Timur merdeka yang dinyatakan secara sepihak sedang berusaha memantapkan kekuasaan, mengikuti pengunduran diri kekuasaan kolonial Portugis yang kacau balau, pasukan payung Indonesia diterjunkan di Dili. Timor Timur menjadi korban pencaplokan pertama di Asia Tenggara oleh negara tetangganya. Dalam bulan dan tahun berikutnya, puluhan ribu orang terbunuh dalam pertempuran, atau secara acak dibantai dalam jumlah besar sebagai suatu bentuk dari terorisme negara. Lebih banyak lagi yang

terbunuh dalam desa-desa strategis model Vietnam[1], ketika bahaya kelaparan, sebagai akibat diisolasinya rakyat dari ladang-ladang subur, yang digambarkan oleh Palang Merah Internasional sebagai 'lebih buruk ketimbang biafra' melanda seluruh negeri itu. Mungkin tidak berlebih-lebihan kalau beberapa pejabat pemerintah Indonesia mengakui angka kematian 200.000 orang, hampir sepertiga dari penduduk suatu wilayah yang luasnya kira-kira sama dengan pulau Tasmania. Mungkin juga hanya ada satu tempat di muka bumi ini dengan begitu banyak kuburan per satuan wilayah. Penyelidikan-penyelidikan lebih intensif semuanya mengungkapkan kebenaran yang menyedihkan bahwa semua tanggal kematian itu adalah sama antara tahun 1977 dan 1979.[2]

---

[1] Model ini pula yang dipakai Amerika Serikat pada waktu perang Vietnam, dan gagal. Metodenya dengan *map bombing*, yaitu membom desa-desa stretegis daerah musuh dari udara berdasarkan peta. Setelah penduduk desa itu pindah, desa tersebut dikuasai sebagai ujung tombak dalam menguasai daerah-daerah lainnya. (ed.)

[2] Gubernur Timor Timur, Abilio Soares, yang dikutip oleh *Sydney Morning Herald*, 15 April 1994. Buku terbaik dewasa ini mengenai invasi terhadap Timor Timur dan masa sesudahnya adalah karya John Taylor, *Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor* (Perang Indonesia Yang Dilupakan: Sejarah Timor Timur yang Tersembunyi), London: Zed 1991. Yang lain adalah tulisan Carmel Budiarjo dan Liem Sio Liong, *The War Againts East Timor* (Perang Terhadap Timor Timur), London: Zed 1984.

Namun demikian perlawanan berlanjut rakyat Timor Timur dewasa ini bila dikaitkan dengan faktor-faktor yang ada dewasa ini sama banyaknya dengan yang didapat dalam ingatan sejarah. Timor Timur semakin mempunyai ciri-ciri yang dikenal sebagai separatisme bersenjata terhadap negara nasion.

Dengan mengalihkan perhatian kepada masalah-masalah masa kini tersebut saya tidak menyatakan bahwa argumen-argumen hukum dan historis tidak relevan lagi, atau bahwa ketidakadilan masa lalu tidak membawa akibat lebih lanjut pada masa sekarang. Tetapi ada beberapa alasan kuat untuk memakai pendekatan baru di sini.

Salah satunya adalah alasan bahwa pengalaman telah memberikan pelajaran yang jelas – kita mungkin dapat mencapai wawasan baru dengan menunda untuk sementara sudut pandang historis untuk kepentingan suatu analisis yang baru. Tetapi yang lebih penting lagi, hal itu memungkin kita untuk membuka suatu dialog dengan banyak pelaku dan komentator yang kuat, yang karena berbagai alasan, telah melakukan hal yang sama.

Pemerintah Indonesia tentu saja mempunyai lebih banyak alasan dibanding siapapun juga untuk berpikir bahwa tahun 1975 adalah tanggal yang sudah lama dan terlupakan dengan cepat. Pemerintah Indonesia selalu menggambarkan perlawanan rakyat Timor Timur sebagai suatu 'separatisme', dengan demikian menempatkannya dalam golongan peristiwa yang sama dengan gerakan-gerakan separatis bersenjata yang melanda Indonesia tahun 1950-an. Para pemimpin

perlawanan Timor Timur yang ditangkap dan diajukan ke pengadilan oleh Indonesia tidak dianggap sebagai tawanan perang, melainkan dituduh melakukan 'pemberontakan' dan 'separatisme'.[3]

Para wartawan asing juga punya ingatan pendek, dengan melestarikan segala macam pandangan salah yang mereka kembangkan di taman sambil minum bir, dan sekarang secara rutin dipakai untuk menggambarkan gerakan rakyat Timor Timur sebagai 'separatisme'.

Masyarakat Internasional (yaitu pemerintah-pemerintahnya) selalu kesukaran untuk melihat Timor Timur sebagai suatu kasus pencaplokan suatu negara berdaulat, sama seperti Kuwait sebagai negara berdaulat dicaplok oleh Irak, misalnya.

---

[3] Misalnya, komandan gerilya Timor Timur, Xanana Gusmao, tokoh utama pemersatu nasionalisme Timor Timur, diadili antara tanggal 1 Februari dan 21 Mei 1993 atas tuduhan yang mencakup bersekongkol untuk melakukan pemberontakan guna mencipatakan pemisahan sebagian dari Indonesia. Suatu laporan mengenai peristiwa-peristiwa ini dapat dibaca dalam Herb Feith, *The East Timor Issue Since The Capture of Xanana Gusmao* (Persoalan Timor Timur seteleh Tertangkapnya Xanana Gusmao), East Timor Talks Campaign, Desember 1993. Jose Antonio Neves (atau Nexis, Neixis) seorang wakil penting Xanana yang bertanggung jawab atas jaringan mahasiswa klendestein ditangkap pada tanggal 19 Mei 1994, pada tanggal 12 Desember diadili dengan tuduhan melancarkan pemberontakan untuk memisahkan Timor Timur dengan Indonesia. (*Kompas*, 13 Mei 1994)

Dalam protes-protes tahunan di sidang Majelis Umum PBB tahun 1975 dan 1982 dan ketika protes-protes tersebut dihentikan, Timor Timur digambarkan sebagai suatu kasus dekolonisasi yang tidak selesai. Hampir tidak ada negara (pemerintahnya) yang mempertimbangkan secara serius pernyataan kemerdekaan yang diumumkan oleh FRETILIN pada tanggal 28 November 1975.[4]

PBB tidak menganggap Timor Timur sebagai suatu negara yang mandiri melainkan masih sebagai koloni Portugal. Portugal ketika itu masih dalam proses mendekolonisasikan daerah tersebut ketika tindakan bebas untuk menentukan nasib sendiri, yang secara normatif menyertai proses dekolonisasi tersebut, diputus oleh pengembilalihan oleh Indonesia. Dalam kata lain PBB, sementara tidak mau mengatakan bahwa kekacauan di Timor Timur adalah 'separatis', terjebak dalam suatu anakronisme historis yang secara konseptual tidak jelas. Suatu aspek penting dalam kekacauan ini adalah bahwa PBB belum merumuskan suatu pendirian yang jelas

[4] Cina dan Vietnam mengirim pesan selamat dengan hangat atas proklamasi tersebut dan lalau memberikan dukungan secara diplomatik. Namun efektifitas dukungan ini dikurangi oleh dinamikan Perang Dingin. Pemerintah-pemerintah baru di bekas koloni Portugis seperti Angola, Mozambique dan Guinea-Bissau memberikan dukungan yang lebih simpatik lagi, tetapi kekurangan sumber daya untuk memberikan perhatin terhadap Timor Timur yang jauh letaknya. Portugal tidak memberi pengakuan, sedangkan Australia mencemoohkan Republik Demokrasi Timor Timur.

mengenai kolonialisme Dunia Ketiga, yaitu kolonialisme oleh bangsa-bangsa Dunia Ketiga itu sendiri, bekas-bekas jajahan (seperti misalnya Maroko atas Sahara Barat), yang berlawanan dengan kolonialisme oleh bangsa-bangsa Barat yang secara historis bersifat imperialis (seperti Portugal).

Invasi memang terjadi 19 tahun yang lalu. Kekuasaan Indonesia *de facto* atas hampir seluruh penduduk tercapai sekitar tahun 1979. Tidak ada pemerintah asing yang menawarkan bantuan untuk melawan pendudukan itu – jauh dari itu. Pemerintah-pemerintah Barat (kecuali Portugal) hampir tanpa ragu-ragu dan bahkan sejak awal memberikan bantuan dan dukungan kepada Indonesia dalam masalah ini.[5] Kalau pelanggaran terhadap hukum internasional saja belum cukup sebagai alasan untuk melancarkan protes terhadap tindakan pencaplokan itu, maka arus laporan terus

---

[5] Reaksi-reaksi pemerintah asing terhadap masalah Timor Timur didiskusikan dalam George Alexander, "East Timor and the Shaming of the West" (Timor Timur dan Dipermalukannya Negara-Negara Barat), *TAPOL* 1985. Masalah ini juga disoroti oleh laporan-laporan standar James Dunn, *Timor: A People Betrayed* (Timor: Rakyat yang Dikhianati), Brisbane, Jacaranda Press 1983 (bab 11), oleh Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism* (Timor Timur: Nasionalisme dan Kolonialisme), Brisbane: University of Queensland Press 1978 (bab 9), dan bab tentang Timor Timur dalam Hamish Mc Donald *Suharto's Indonesia*, Fontana/Collins 1980 (bab 9). Buku John Taylor telah disebutkan di atas.

menerus yang merinci pelanggaran hak asasi manusia yang kuat pun tidak akan mencukupi.

II. Separatisme Asia Tenggara

Sejauh ini aneksasi (pencaplokan) suatu wilayah di Asia Tenggara jarang terjadi, tetapi separatisme bersenjata merupakan suatu gejala yang cukup dikenal. Kaum Karen dari Birma, kaum Moro dari Filipina, pemberontakan PRRI di Indonesia tahun 1958 dan Gerakan Aceh Merdeka yang berlangsung lama di Indonesia, semuanya adalah kasus-kasus yang dimaksud. Banyak karya teoritis telah dihasilkan mengenai gerakan-gerakan separatis bersenjata terhadap negara nasion. Kita akan menggunakan salah satunya tersebut karya Ruth McVey.[6]

Kondisi Sosial

Kondisi bagi eksistensi suatu gerakan separatisme terhadap suatu negara nasion terbagi dalam dua kategori – sosial dan ekonomi. Yang terdahulu berkaitan dengan kegagalan integrasi nasional.

Golongan Elit

Dalam beberapa kasus penting, khususnya di Asia di mana sebagian besar penduduknya tidak

---

[6] Ruth T, McVey, *Separatism and Paradoxes of the Nation-State in Perspective* (Separatisme dan Paradoks Negara-nasion dalam Perspektif), dalam Lim Joo Jock dan Van. S (peny.), *Armed Separatism in Southest Asia* (Separatisme Bersenjata di Asia Tenggara), hal 3-29, Singapura: ISEAS 1984.

banyak tahu politik, kegagalan semacam itu tidak terlalu memusingkan sebagian besar rakyat, tetapi kegagalan semacam itu bukan hanya selubung retorika bagi konflik antar elit. Konflik itu bukan mengenai kebudayaan nasional, melainkan mengenai rejeki kekuasaan.

Adalah mungkin, sekalipun tidak sepenuhnya menyakinkan, untuk memandang peristiwa perlawanan Timor Timur sebagai konflik antar elit juga. Kita dapat mendokumentasikan bahwa militer Indonesia sejak awal memandang masalah Timor Timur dengan kaca mata kaum elit. Militer Indonesia telah memperoleh pengalaman dalam menangani gerakan-gerakan separatis yang bersifat elit dalam lingkungan perbatasannya sendiri pada tahun 1950-an (pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/PRRI di Sumatera Timur). Pendekatan awal terhadap Timor Timur -- yang bertepatan dengan tanda-tanda pertama kehidupan politik di Timor Timur segera setelah Revolusi Anyelir pada bulan April 1974 dan 18 bulan sebelum invasi militer besar-besaran -- adalah operasi tertutup yang diberi nama *Operasi Komodo.* Tujuannya adalah untuk mempengaruhi para anggota masyarakat yang paling mungkin menjadi kelompok elit Timor Timur.

Operasi ini sebagian berhasil, terutama setelah perang saudara yang singkat namun berdarah pada bulan Agustus 1975, yang memaksa para pemimpin partai yang kalah (UDT) jatuh dalam pelukan Indonesia di seberang perbatasan. Beberapa orang yang kemudian mendukung integrasi Timor Timur dengan Indonesia tetap menjadi pendukung yang

yakin terhadap gagasan itu (misalnya Lopez da Cruz), tetapi sebagian lainnya kecewa (misalnya Joao Carascalao).

Yang lebih dapat menerima gagasan integrasi itu dibanding dengan kaum profesional perkotaan dari UDT[7] adalah partai APODETI[8] yang lebih kecil, yang berkaitan dengan kepala-kepala suku tradisional, yang dalam program partainya benar-benar mencantumkan persatuan (bersyarat) dengan Indonesia.[9]

Operasi Komodo mendapat sukses paling sedikit dengan FRETILIN[10] yang populis, partai utama lain

---

[7] Partai *Uniao Democratica de Timor* ini orientasi politiknya adalah tetap di bawah Portugal dengan status federasi dan merdeka setelah masa peralihan selama 20 tahun dan menolak integrasi negara asing. Kebanyakan para pengikut partai ini adalah para birokrat dan kepala-kepala suku. Partai ini diketuai oleh Francisco Lopez da Cruz. (ed.)

[8] Orientasi *Partai Associacao Populer Democratica de Timor* ini menginginkan Timor Timur berintegrasi ke Indonesia menurut hukum internasional, dengan otonomi di semua segi kecuali politik luar negeri dan hankam. Pengikut partai ini dari kalangan menengah Timor Timur, yang jumlahnya paling sedikit dari dua partai lainnya. Ketuanya adalah Jose Fernando Osario.(ed.)

[9] Salah satu pelaku utama Indonesia dalam pendekatan elitis ini baru saja menerbitkan memorinya: E.M. Tomodok, *Hari-Hari Akhir Timor Portugis*, Jakarta: Pustaka Jaya 1994

di Timor Timur, yang dipimpin oleh kaum nasionalis radikal dan beberapa orang kaum sosialis. Tetapi pendekatan elitis terhadap Timor Timur gagal sebab golongan elit Timor Timur tidak bebas untuk bergerak terlalu dekat dengan Indonesia tanpa kehilangan resiko legitimasi dari para pemilih mereka sendiri. Lopez da Cruz, misalnya, sekarang tinggal di Jakarta dan tidak di Timor Timur.

Kesadaran Masyarakat

Setiap gerakan separatis yang pantas disebut demikian lebih didasarkan pada kesadaran masyarakat yang kuat ketimbang pada suatu kelompok elit kecil yang rentan terhadap tawar menawar patronase antar elit. Banyak pengamat sekarang menggambarkan Timor Timur sebagai kasus nasionalisme yang berkembang sepenuhnya.

Nasionalisme Timor Timur hampir mengalami ledakan hidup sehingga menyertakan massa dalam politik setelah Revolusi Anyelir di negara metropolitan Portugal bulan April 1974. Nasionalisme ini pun tidak mereda setelah invasi Indonesia bulan Desember 1975. Suatu pemerintahan Timor Timur yang agak efektif memerintah sebagian besar penduduk di daerah pendalaman berjalan sampai bulan November 1978.

---

[10] Partai *Frente Revolucio de Timor Leste Independento* ini semula bernama ASDT (*Associacao Social Democratica de Timor*). Orientasi politiknya menginginkan Timor Timur segera merdeka dari Portugal. Ketuanya Francisco Amaral, dan wakilnya Nocolau Lobato.(ed.)

Bahkan lebih dari tahun-tahun masa pembentukannya selama empat atau lima tahun, hampir dalam dua dasawarsa mengalami teror sewenang-wenang di tangan militer asing, telah menciptakan komunitas yang mungkin tidak pernah ada sebelumnya. Kita hanya memperoleh kilasan hal-hal yang terjadi selama tiga belas tahun setelah berakhirnya tahun 1975, ketika Timor Timur masih tertutup sama sekali dari luar.[11]

Banyak dari penderitaan ini diungkapkan lewat Gereja Katolik. Uskup Belo – yang tidak mempunyai riwayat keterlibatan politik dan pernh mengatakan bahwa keinginannya yang sebenarnya adalah pergi ke Cina sebagai misionaris – berkali-kali berbicara bahwa ia dipaksa oleh jemaatnya untuk mengungkapkan penderitaan mereka. Ketika ia berkata dalam suatu kotbah bahwa 'penderitaan orang-orang yang teraniaya dan terpenjara merupakan pengulangan dari penderitaan dan kematian Kristus', orang tahu apa yang dimaksudnya.[12]

---

[11] Beberapa kilasan dapat dibaca dalam Michele Turner, *Telling East Timor: Personal Testimonies 1942-1992* (Bercerita tentang Timor Timur: Kesaksian Pribadi 1942-1992), New South Wales University Press 1992. Tidak ada yang menggambarkan ketidakacuhan yang kejam ini lebih baik ketimbang pengakuan Australia *de jure* mengenai integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1970, ketika perang sedang berlangsung hebat hebatnya dan korban berjatuhan dalam jumlah besar.

Pada mulanya gerakan-gerakan separatis populer menyandarkan diri pada kesetian tradisional, dan dengan demikian kekurangan kepemimpinan berwibawa yang tunggal, dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Cara yang umum di mana perbedaan-perbedaan di kalangan pemimpin perlawanan Timor Timur itu tampak, identifikasi yang tidak bisa dihapuskan dengan partai-partai politik yang benar-benar dapat berfungsi dalam waktu singkat hampir dua dasawarsa yang lalu – hal ini memang mengacu pada suatu pola patrimonialisme tradisonal yang berakar pada komunitas bahasa dan kekerabatan setempat. Perpecahan di kalangan elit tentulah suatu peluang yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah Indonesia. Tetapi dalam pada itu hal tersebut juga memperlihatkan luasnya dukungan rakyat.

---

[12] Mgr. Ximenes Belo mengeluarkan secara tetap sarangkaian surat dan wawancara yang diterbitkan bahkan di Indonesia. Baru-baru ini ia mengeluarkan pernyataan-pernyataan tentang jumlah orang yang meninggal dalam pembunuhan besar-besaran di Dili tanggal 12 Desember 1991, tentang perlunya diadakan referendum untuk memungkinkan rakyat Timor Timur menentukan masa depan mereka sendiri, minta dukungan dari Gereja Katolik dan Pemerintah Australia, berbicara di depan konprensi APCET di Manila, dan tentang berlanjutnya perlakuan kejam oleh pihak militer. Setelah tertangkapnya Xanana Gusmao, CNMR seringkali mengutip Belo untuk mendukung usulan-usulan politikya.

Kondisi-Kondisi Ekonomi

Dalam jangka panjang, demikian McVey menunjukkan, kesetiaan-kesetiaan tradisional ini melemah dan diganti dengan kesetiaan-kesetiaan yang lebih sekuler. Pemberontakan, kalau berlangsung lama, semakin terpusat pada penganiayaan birokratis dan pembagian sumber daya yang tidak adil. Dalam hubungan ini, keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan separatis bersenjata tergantung pada kegagalan atau keberhasilan suatu negara nasion mempertahankan tatanan sosial yang bisa diterima secara umum. Oleh karena itu, suatu alat yang amat baik untuk menganalisa gerakan-gerakan separatis adalah dengan melihat ketimpangan-ketimpangan ekonomi.

Seperti Aceh di Sumatra Utara, dan Irian Jaya yang berdekatan dengan Papua Nugini (satu-satunya tempat di Indonesia di mana perlawanan terhadap negara dapat digambarkan sebagai separatisme bersenjata), Timor Timur terletak di wilayah perbatasan. Penetrasi Ekonomi dari pusat di ketiga wilayah ini selalu lemah, atau lebih tepat diselewengkan dan mempunyai sifat kolonial. Keberatan utama di ketiga wilayah ini adalah bahwa banyak terjadi kegiatan ekonomi tetapi para putra daerah tidak memainkan peran apa pun di dalamnya. Aceh mempunyai ladang gas yang besar dan industri petrokimia yang berkaitan, Irian Jaya mempunya tambang emas dan tembaga yang terbesar di dunia di samping hasil-hasil kayunya, sedangkan Timor Timur sekarang mempunyai

eksplorasi minyak yang diyakini akan menghasilkan penemuan penting.[13]

Pemerintah Indonesia dengan hati-hati menawarkan suatu gambaran Timor Timur yang menderita karena diabaikan di bawah kolonialisme Portugal, dan menikmati keuntungan dari investasi besar yang diprioritaskan ke bidang prasarana dan pelayanan sejak menjadi salah satu propinsi Indonesia. Banyak orang asing telah melihat gedung-gedung baru didirikan dan menerima gambaran yang disuguhkan di sekitar gedung tersebut. Tetapi studi-studi sosial menyangsikan ketepatan gambaran tersebut.[14]

---

[13] Woodside Petrolium Ltd. pada pertengahan Oktober 1994 mengumumkan bahwa sumur-sumur dibor sedikit di luar wilayah Celah Timor Timur menunjukkan adanya kandungan minyak antara 100 dan 300 juta barel. Tampaknya mungkin sekali bahwa cadangan ini meluas ke dalam Celah Timor itu sendiri – perairan ini dulu merupakan bagian dari koloni Portugis. Ketimpangan ekonomi dan kaitannya dengan separatisme ditelaah dalam Anne Booth, "Can Indonesia Survive a Unity Nation?" (Bisakah Indonesia Bertahan Sebagai Negara Kesatuan?), *Indonesian Circle*, No. 58, hal. 32-47, 1992.

[14] Analisis terbaik mengenai perekonomian Timor Timur adalah tulisan Joao Marriano de Sousa Saldanha, *The Political Economy of East Timor Development* (Ekonomi Politik Pembangunan Timor Timur), Jakarta Sinar Harapan 1994. Suatu tinjauan kritis terhadap buku Saldanha dalam bahasa Ingris dimuat dalam terbitan Desember 1994 dari *The Missing Peace* (Perdamaian yang hilang yang diterbitkan oleh East Timor Peace Campaign,

Kurun waktu di bawah Portugis tidaklah sesuram, begitu pula waktu di bawah Indonesia tidaklah begitu gemerlap, seperti yang diungkapkan gambar-gambar itu. Bahkan sekarang perekonomian di wilayah itu dalam banyak hal belum pulih dari akibat-akibat yang menghancurkan dari tahun 1975-1979.

Industri pariwisata yang pernah tumbuh subur telah runtuh, persediaan kerbau (sebagai hewan penarik bajak) masih di bawah tingkat sebelum tahun 1975, swasembada beras belum dapat dipulihkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi tidak lebih tinggi dibanding dengan tingkat pertumbuhan selama tahun-tahun terakhir kekuasaan Portugis. Timor Timur tidak mempunyai kapasitas industri yang produktif. Jumlah uang yang besar memang mengalir ke Timor Timur selama kurun waktu di bawah Indonesia, sebagian besar dari padanya mengalir kembali ke pusat-pusat Indonesia di Jakarta, Surabaya tanpa meninggalkan sesuatu yang produktif.

Perekonomian Timor Timur menampilkan suasana perbatasan kolonial dari eksploitasi tanpa keringanan oleh orang-orang luar untuk kepentingan-kepentingan luar. Pembukaan Timor Timur bagi pengunjung non militer pada awal 1989 ditujukan untuk mengurangi suasana perbatasan tersebut dan menarik para investor lain, tetapi hasil yang benar-benar positif belum pernah dicapai

---

124 Naiper St., Fitzroy 3065, Melbourne, Austrlia. Analisis pengenai prospek perdamaian dalam epilognya Saldanha dalam banyak hal sesuai dengan analisa saya.

sejauh ini. Timor Timur tetap propinsi termiskin di Indonesia berdasarkan banyak indikator sosial. Kalau cadangan besar minyak ditegaskan keberadaannya di perairan yang dianggap oleh orang Timor Timur sebagi miliknya, dan hasilnya tidak ada yang dialokasikan kepada Timor Timur, hal ini akan berpengaruh besar pada ketegangan separatis.

Tidak ada yang lebih baik dalam memperkuat kekhawatiran ini selain huru hara yang melanda ibukota Timor Timur, Dili, selama dua minggu pada pertengahan November 1994.[15] Huru hara ini dipicu oleh pembunuhan seorang pedagang Timor Timur di pasar Dili oleh pedagang pendatang dari Sulawesi. Sebanyak 150.000 pendatang dari luar, banyak diantaranya dari Sulawesi, telah datang ke Timor Timur dan sekarang telah total menguasai perdagangan jalanan. Banyak para pendatang yang mencari perlindungan di kantor polisi selama terjadinya huru hara. Dan Polisi berkata bahwa pendatang yang suratnya ada yang tidak beres akan diusir. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Lebih dari pada hal-hal lain, meluasnya perlawanan terhadap sektor perkotaan modern disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi ini. Demonstrasi-demonstrasi digerakkan oleh orang-orang muda berpendidikan dan bahkan oleh

---

[15] Cerita pertama yang mengungkap pentingnya kekuatan-kekuatan ekonomi dibelakang huru hara itu terdapat dalam artikel David Ingham dalam *The Australian*, 22 November 1994.

pegawai negeri yang tidak yakin bahwa tatanan Indonesia akan memberikan pada mereka setiap harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Munculnya perlawanan yang berpangkalan di kota-kota di kalangan suatu generasi yang sepenuhnya terdidik dalam sistem Indonesia merupakan petunjuk paling kuat bahwa dukungan rakyat untuk pemisahan digerakkan oleh keadaan-keadaan masa kini yang sama kuatnya dengan sejarah masa lalu.

III Pemecahan Masalah Separatisme

Suatu gerakan separatis wilayah dapat diselesaikan dengan satu diantara cara-cara berikut: pemisahan, otonomi atau asimilasi. Yang tidak disebut oleh McVey tetapi sayangnya riil adalah kemungkinan keempat, yaitu bahwa gerakan itu tidak diselesaikan melainkan ditindas atau secara demografis dibanjiri oleh emigran (pendatang).

Pemisahan

Sedihnya, pemisahan secara damai mungkin sekali tidak pernah berhasil. Negara nasion modern di mana pun, demikian Mcvey mengemukakan agak tajam, akan mengorbankan penduduk -- dengan pengusiran atau pembasmian -- tetapi tidak pernah mengorbankan wilayah. Dalam kasus Timor Timur lebih tidak mungkin lagi, sebab tujuan pencaplokkan wilayah itu pertama-tama adalah meniadakan suatu negara nasion merdeka baru di sisi Selatan Indonesia.

Tentu saja adalah mungkin bahwa pertimbangan-pertimbangan Perang Dingin-lah yang menyebabkan pencaplokkan itu -- kekuatiran suatu negara komunis model 'Kuba' di sebelah Selatan Indonesia -- sudah kehilangan bobot sekarang. Tetapi, desakan Indonesia bahwa perlawanan Timor Timur adalah 'separatisme' tentulah sukar untuk membayangkan bagaimana Timor Timur sekarang memisahkan diri tanpa mendorong 'separatisme' di tempat-tempat lain. Tidak seorang pun yang menginginkan pemisahan gaya Uni Soviet atas

rakyat Indonesia, demikian pula hal itu tidak dapat diramalkan terjadi masa akan datang.

Maka kemungkinan besar yang akan terjadi adalah pemisahan secara damai berubah menjadi separatisme bersenjata. Pemisahan dengan demikian bergantung pada tercapainya keunggulan militer. Para prajurit Timor Timur benar-benar mengejutkan semua orang – kualitasnya tidak lebih rendah dari suatu angkatan bersenjata yang penduduknya 200 kali lebih besar – yang ternyata lebih dari sekedar tandingan yang sepadan bagi angkatan perang Indonesia selama tiga tahun pertama. Kurang terlatih namun tidak begitu kekurangan peralatan (mereka mewarisi perlengkapan persenjataan NATO), mereka benar-benar melakukan pertempuran mati-matian selama enam bulan pertama, sebelum beralih ke perang gerilya. Beribu-ribu prajurit Indonesia juga tewas dalam pertempuran, dan kadang masih muncul cerita-cerita di pers Indonesia tentang kesukaran-kesukaran yang ditimbulkan oleh FALINTIL[16].

Perlawanan bersenjata ini masih aktif sampai hari ini, dengan dibantu oleh medan yang sulit, tetapi dalam tingkat yang jauh berkurang, dan

---

[16] *Forcas Armadas da Libertacao Nicional de Timor Leste* ini adalah sayap militer dari FRETILIN yang berbasis di pegunungan Timor Timur sampai sekarang. Komandan pertamanya adalah Nicolao Lobato, setelah tewas dalam pertempuran digantikan oleh Kay Rala Xanana Gusmao, yang sekarang ditahan pemerintah Indonesia di penjara Cipinang Jakarta. Sebagai pelaksana harian FALINTIL, selama Xanana dipenjara, adalah Nino Konis Santana.(ed.)

hampir-hampir bersifat simbolis saja. Para pejuang gerilya tidak mendapat bantuan dari luar negeri.[17] Pertikaian bersenjata sekarang berfungsi sebagai latihan benaran bagi seluruh angkatan bersenjata Indonesia, yang digilir di seluruh wilayah itu selama jadwal waktu rutin sembilan bulan. Singkatnya, tidak ada peluang bagi keunggulan militer Timor Timur.

Beberapa gerakan perlawanan yang kalah jumlah di daerah perbatasan masih bertahan karena mereka mendapat bantuan dari salah satu negara tetangga. Tetapi satu-satunya tetangga internasional Timor Timur, Australia, adalah sekutu aktif dari kekuatan Indonesia yang mencaplok wilayah itu sejak awal. Tidak ada gambaran yang lebih baik dari persekutuan ini ketika Perdana Menteri Australia Fraser beberapa saat sebelum berkunjung ke Jakarta bulan Oktober 1976 memerintahkan agar pemancar radio FRETILIN di Darwin disita. Radio pada waktu itu merupakan satu-satunya jalur komunikasi yang tersedia pada kekuatan perlawanan Timor Timur.

---

[17] Lihat wawancara dengan komandan gerilya CNMR, Konis Santana, oleh Jill Jolliffe dalam *The Age* dan *Publico*, kedua-duanya tanggal 26 Agustus 1994. Ada pasar gelap yang memperjual belikan senjata di Indonesia, di mana gerakan perlawanan mempunyai beberapa peluang untuk memasukinya.

Otonomi

Pilihan kedua bagi suatu gerakan separatis adalah menerima suatu bentuk otonomi wilayah separatis. Hal ini sebenarnya merupakan sederet pilihan, dari otonomi nominal sampai otonomi hampir penuh, yang semuanya dibatasi dengan tetap dimilikinya suatu bentuk kedaulatan dari pusat negara nasion itu. Karena begitu banyak orang berbicara tentang pilihan ini, kita perlu agak luas merincinya.

Kebijakan APODETI tahun 1974-1975 sesungguhnya adalah untuk menjadikan Timor Timur daerah otonom di lingkungan Indonesia -- suatu rincian yang biasanya dilupakan oleh kawan maupun lawan Indonesia, tetapi yang sekarang mulai ditekankan kembali oleh para pengikut lama APODETI yang bekerja di kalangan birokrasi Indonesia.

Pilihan ini tetap merupakan pilihan yang lebih disukai oleh orang Timor Timur yang mendapat kesempatan bekerja di dalam sistem Indonesia -- para anggota parlemen, para akademisi, para pemimpin gereja. Sangat mengherankan bahwa usulan untuk otonomi ini diajukan oleh orang-orang dari berbagai kalangan.

Gagasan itu mungkin untuk pertama kali muncul di Indonesia dalam laporan yang sedikit dikenal pada awal 1990 oleh para ilmuwan sosial Universitas Gajah Mada, Mubyarto dan Lukman Soetrisno, yang menyarankan badan-badan kontultasi khusus dan melibatkan Gereja Katolik. Pada kira-kira waktu tersebut majalah Gajah Mada

"Prospek" juga memuat artikel oleh Herb Feith yang mengusulkan perubahan konstitusi lebih mendasar untuk tujuan yang sama.[18]

Uskup Belo sudah pada awal tahun 1989 menulis sepucuk surat kepada Sekretaris Jendrak PBB minta diadakannya refendum mengenai masa depan wilayah itu. Tetapi hal ini hanya menimbulkan gelombang penahanan di Timor Timur hanya karena dicurigai bersimpati terhadap surat tersebut. Sejak akhir tahun 1991, segera setelah pembunuhan besar-besaran di Dili yang menimbulkan trauma bulan November, ia mulai menyerukan otonomi bagi Timor Timur sebagai alternatif terbaik berikutnya dan paling bisa dilaksanakan, mengingat reaksi

---

[18] Laporan dari Universitas itu dilarang dan hanya sempat beredar sangat terbatas. Laporan itu tersedia dalam bahasa Inggris dalam Mubyarto, *East Timor - The Impact of Integration: An Indonesian Socio-Anthropological Study* (Timor Timur - Dampak dari Sebuah Integrasi: Suatu Studi Sosio-Anthropologi Indonesia), Melbourne: IRIP 1991. Herb Feith, "New Note for East Timor: From Creative Constitution Mongering Elsewhere" (Catatan Baru Untuk Timor Timur: Dari Perubahan Konstitusi secara Kreatif di Suatu Tempat), *Prospek*, jilid 2, No.3, hal. 262-70, 1990; belakangan diterbitkan dalam bentuk singkatan dalam *For Economic Review*, 5 Juli 1990, Kolom kelima. Minat APODETI pada otonomi daerah diingatkan oleh wartawan Indonesia George Aditjondro, yang berada di Timor Timur tahun 1974. Masalah yang tersebut belakangan sekarang tersedia dalam bahasa Inggris dalam *East Timor: An Indonesian Intellectual Speaks Out* (Timor Timur: Seaorang Intelektual Indonesia Berbicara secara Terbuka), Melbourne: ACFOA 1994.

Indonesia yang begitu keras terhadap gagasan referendum tersebut. Sejak itu ia telah mempertegas pendiriannya yang sama beberapa kali.

Beberapa orang anggota parlemen dari Timor Timur, maupun beberapa cendekiawan Timor Timur di universitas-universitas di Indonesia, sejak itu juga ikut mengumandangkan gagasan tersebut dengan kepercayaan diri yang semakin besar.[19]

Berikutnya, 'otonomi' muncul dalam suatu rencana perdamaian kreatif yang diusulkan bulan April 1992 oleh pemimpin CNMR[20] Jose Ramos Horta, dengan persetujuan Xanana Gusmao, yang waktu itu masih ada di pegunungan Timor Timur. Rencana itu yang masih berlaku menurut CNMR, menggambarkan suatu tahap perundingan

---

[19] Salah seorang dari cendekiawan in adalah Saldanha (*op.cit.*), hal 336-341. Yang lain adalah wakil rektor Universitas Timor Timur, Armindo Maia, yang telah berdemonstrasi di Dili bulan Juli 1994, berkata bahwa otonomi adalah jalan tengah yang terbaik antara keinginan pejabat Indonesia dan rakyat Timor Timur. Anggota DPR yang berbicara paling terbuka di Jakarta adalah Salvador Ximenes Soares, salah seorang pemilik harin di Dili *Suara Timor Timur*.

[20] *Concelho Nacional do Resistencia Maubere* (Dewan Nasional Perlawanan Rakyat Maubere) ini merupakan organisasi payung -- yang di dalamnya termasuk ketiga partai (APODETI, UDT, FRETILIN) dan organisasi-organisasi independen nasionalis Timor Timur seperti Renetil, Ojectil dan lain-lain -- yang bertujuan memerdekakan Timor Timur. Ketuanya adalah Kay Rala Xanana Gusmao.(ed.)

meyeluruh, diikuti dengan suatu kurun waktu lima sampai sepuluh tahun otonomi di bawah pengawasan PBB, yang dikeluarkan dalam suatu referendum di mana rakyat Timor Timur menentukan sendiri masa depannya. Rencana yang sayangnya diabaikan ini harus mengatasi oposisi intern yang sangat besar dari pihak-pihak yang merasa usulan ini mengalah terlalu banyak kepada pemerintah Indonesia.[21]

Dalam bulan Mei 1994 Gubernur Timor Timur Abilio Soares, seorang APODETI, mengedarkan sebuah usulan untuk otonomi struktural bagi Timor Timur, dengan menggunakan istilah "Daerah Istimewa" yang sudah digunakan di daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu di Aceh dan Yogyakarta. Tampaknya ia percaya pada dukungan beberapa tokoh pemerintahan dan militer senior, khususnya dari anak menantu Presiden, Kolonel Prabowo Subianto.

Pemerintah-pemerintah asing yang ingin menjalin hubungan baik dengan Indonesia juga menyambut baik gagasan itu sejak Timor Timur menjadi sorotan dunia internasional kembali bulan November 1991. Gareth Evans berulangkali menyerukan agar pemerintah Indonesia mengurangi jumlah pasukan militernya di Timor Timur dan memberikan otonomi yang luas pada "propinsi" itu. Presiden Clinton berbicara kepada Presiden Suharto

---

[21] Rencana perdamaian CNRM dapat diperoleh dalam bentuk suatu lampiran dalam Herb Feith, *The East Timor Issue Since the Capture of Xanana Gusmao'* (Persoalan Timor Timur Sejak Tertangkapnya Xanana Gusmao), 1993.

mengenai otonomi bagi Timor Timur di Tokyo bulan Agustus 1993 dan sekali lagi di Bogor bulan November 1994. Bahkan Portugal, yang baginya Timor Timur sudah menjadi persoalan kebanggaan nasional, dilaporkan juga berpikir bahwa gagasan itu merupakan pemecahan yang paling dapat dicapai. Spekulasi pers bulan Februari 1993 mengatakan bahwa Vatikan berkepentingan mencari jalan untuk menjadi mediator antara Indonesia dan Portugal dalam perselisihan itu, dan persoalan otonomi juga tercantum dalam agenda. Banyak pihak berharap bahwa Indonesia dapat dimotivasi untuk memberi otonomi kepada Timor Timur dengan harapan (mungkin realistis) bahwa hal ini akhirnya, akan menghapus masalah Timor Timur di agenda PBB.

Sayangnya aktor terkuat dalam drama Timor Timur ini -- pemerintah Indonesia -- terus bersikeras dengan kuat menentang setiap saran mengenai otonomi luar biasa bagi Timor Timur. Gagasan referendum yang dikemukakan Uskup Belo pada tahun 1989 hampir tidak mempunyai peluang untuk dimunculkan dalam pers Indonesia dan menyebabkan banyak penahanan. Sarannya mengenai otonomi tahun 1991 dengan segera ditolak Menteri Dalam Negeri, Rudini, dengan berkata bahwa apa yang disebut "Daerah Istimewa" di Indonesia (Aceh dan Yogyakarta), sesungguhnya otonomi dalam nama saja karena Indonesia tidak mngenal otonomi daerah. Menteri Pertahanan Benny Moerdani mengatakan bahwa Timor Timur telah mendapat perlakuan sangat khusus yang setara dengan otonomi -- suatu pandangan yang sejak saat itu diikuti secara konsisten oleh para tokoh senior ABRI.

Menteri Luar Negeri Ali Alatas berulang-ulang dan dengan keras mengingkari bahwa pemerintahnya sedang melakukan perundingan yang tujuannya untuk menciptakan otonomi di Timor Timur. Dalam pertemuan APEC bulan November 1994, Presiden Suharto dilaporkan telah memberitahu Presiden Clinton bahwa tidak akan ada status khusus bagi Timor Timur. Ini merupakan penolakan langsung terhadap saran Clinton.

Satu-satunya petunjuk bahwa tokoh-tokoh tertentu dalam pemerintah memang berpikir untuk memberikan semacam otonomi adalah suatu laporan intern ABRI tentang Timor Timur akhir September 1994. Laporan ABRI itu hanya "merekomendasikan perubahan-perubahan pada kebiasaan yang berlaku, dan bukan suatu peralihan penting dalam kebijakan yang dapat menuju pemerintahan sendiri yang lebih besar bagi bekas kantong Portugis itu". Laporan ABRI itu merupakan apa yang oleh seorang pengamat dikatakan sebagai 'diplomasi pararel' yang dengan sengaja memotong keterlibatan PBB. Suatu peran yang menggugah rasa ingin tahu adalah apa yang sedang dilakukan di kalangan ABRI mengenai masalah ini oleh Kolonel Prabowo Subianto yang bintangnya sedang naik.[22]

Indonesia mempunyai pengalaman singkat dengan federalisme yang dipaksakan tahun 1950 yang dengan segera diganti lagi. Hal ini memang menyelesaikan gerakan separatis di Aceh dengan memberikan kepadanya status "Daerah Istimewa"

---

[22] 'Change in the Wind' (Perubahan Arah Angin), *Far Eastern Economic Review*, 6 Oktober 1994.

pada tahun 1959, tetapi (seperti yang ditunjuk oleh Rudini dengan tepat) perekonomian Aceh sedikit demi sedikit terus merosot sejak waktu itu dan sekarang hanya bersifat nominal belaka. Konsep itu membangkitkan rasa tidak senang yang amat besar di kalangan elit yang berkuasa, yang menganggap hal ini sebagai melemahkan negara. Para pengusul suatu bentuk pluralisme politik atau bahkan pluralisme budaya mengalami penindasan. Kekuatiran ini sampai sekarang dikenakan tidak hanya pada istilah 'federalisme', tetapi juga 'otonomi'.

Singkatnya, gagasan untuk membentuk suatu daerah dengan otonomi khusus di Timor Timur bukanlah hal yang mudah diterima oleh Indonesia. Tetapi konsep itu lebih mudah ketimbang pemisahan, dan tidak akan cepat ditinggalkan. Orang-orang yang optimis mencatat, mengingat tekhnik Suharto yang sudah dikenal sejak lama untuk memberi isyarat yang bertentangan, penolakan yang bertubi-tubi mungkin justru menyamarkan gerakan yang sebenarnya.

Perdebatan kemudian berpusat pada derajat otonomi yang dapat dicapai. Dua kutub dalam perdebatan itu adalah program seluruh Indonesia yang sedang berlangsung mengenai desentralisasi pemerintahan daerah tingkat I di satu pihak, dan rencana Horta-CNMR mengenai otonomi yang diawasi PBB dan dijamin secara internasional di lain pihak. Hanya sesuatu yang menyerupai rencana

CNMR akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik.[23]

Asimilasi

Akhirnya, para pemimpin kelompok minoritas separatis mungkin saja mengalami asimilasi etnis dan kultural ke dalam kelompok mayoritas. Asalkan kelompok elit yang memimpin ini dapat mempertahankan keabsahannya (sebagaimana didiskusikan di atas), maka hal ini akan menandai runtuhnya gerakan separatis tersebut. Para ilmuwan dewasa ini mengakui bahwa kesukuan bukan merupakan sesuatu yang tetap dan lestari. Kesukuan dapat dirundingkan. Orang dapat mengubah kesukuan atau malah mempertahankan kesukuan ganda. Sekolah adalah tempat klasik dimana

---

[23] Para peneliti persoalan ini akan melakukannya dengan baik untuk memulainya dengan prakarsa Liechtehstein tentang Hak Menentukan Nasib Sendiri pada PBB pada bulan Maret 1993. Usul dimaksudkan untuk membantu negara-negara dengan komunitas-komunitas berbeda yang mengalami frustasi dalam merumuskan semacam otonomi intern bagi komunitas-komunitas itu. Naskah ini dapat diperoleh dengan mudah sebagai lampiran 8 dari karya Herb Feith, *East Timor Issue Since the Capture of Xanana Gusmou,* 1993. Seluruh penerbitan ini merupakan bacaan yang baik sekali mengenai prospek-prospek bagi perdamaian di Timor Timur. Lihat juga Herb Feith dalam Alan Smith, "Self Determination in the 1990's: Equipping the UN to Resolve Ethno-Nasionalist", dalam K. Rupesinghe (peny.) *Conflict Transformation,* London: McMillan 1993

asimilasi berlangsung. Asimilasi merupakan strategi yang paling dapat dilaksanakan paling luas terhadap minoritas Asia.

Tetapi asimilasi bukanlah suatu penyelesaian murah, seperti yang biasa sering dipikirkan. Agar suatu gerakan separatis runtuh, kondisi-kondisi yang menyebabkan gerakan itu tetap hidup harus dihilangkan. Ini berarti, pertama, bahwa hambatan-hambatan sosial yang memperkuat rasa kesukuan dari suatu komunitas harus dihapuskan. Kelonggaran perlu diberikan, kata McVey, pada kenyataannya asimilasi merupakan sesuatu yang bernilai dan harus dibayarkan pada elit suku minoritas yang mengadopsinya. Mereka harus diberi konpensasi dengan kesempatan ekonomis karena alienasi yang mereka alami dari kelompok mereka sendiri.

Maka dari itu, kedua, perekonomian wilayah tersebut harus diintegrasikan dengan perekonomian nasional dan harus menawarkan persamaan murni. Keberhasilan suatu strategi asimilasi tergantung pada tersedianya mobilitas ke atas yang nyata bagi orang-orang yang memasukinya. Kalau kedudukan dalam birokrasi tidak tersedia, maka strategi itu dapat meledak sebelum waktunya dan justru akan menimbulkan perlawanan dari kelompok elit terpelajar.

Strategi asimilasi telah dicobakan Indonesia di Timor Timur, dengan beberapa keberhasilan. Tetapi keberhasilan itu tidak permanen sifatnya, dan bahkan telah mengalami kemunduran.

Mario Carrascalao

Sekalipun kebijakan Indonesia biasanya tidak memberi komitmen bagi seorang gubernur bumiputra, Timor Timur selama ini selalu mempunyai seorang gubernur putra daerah. Beberapa diantaranya tidak berdaya di bawah pengawas militer mereka. Tetapi gubernur ketiga di bawah Indonesia banyak mendapat pujian dari pers Indonesia karena lebih kuat dari setiap gubernur lainnya di Indonesia. Di bawah Mario Carrascalao (1982-1992), dana yang cukup besar disisihkan untuk mendidik para pelajar Timor Timur di universitas-universitas yang lebih baik di Indonesia. Mungkin kira-kira seribu mahasiswa dikirim ke Jawa, Bali dan tempat-tempat lain -- suatu jumlah yang tidak sedikit untuk daerah sekecil Timor Timur.[24] Beberapa diantaranya kemudian pergi ke luar negeri untuk studi pasca sarjana dan sekarang mulai kembali ke Timor Timur, beberapa orang sebagai dosen di universitas-universitas baru yang kecil di Dili. Ini adalah suatu generasi yang dididik sepenuhnya di bawah sistem Indonesia. Usaha Carrascalao yang berhasil membuka Timor Timur bagi orang sipil dari luar menjelang awal 1989 terutama juga bertujuan untuk memungkinkan asimilasi orang-orang Timor Timur dalam perekonomian pada umumnya.

---

[24] Lihat "Getting to Know You: East Timorese in Indonesia" (Berkenalan dengan Anda: Orang Timor Timor di Indonesia), *Inside Indonesia*, No. 28, Oktober 1991, hal. 8-9.

Pembunuhan Besar-Besaran di Dili

Kemunduran yang paling mendadak dari kebijakan Carrascalao adalah pembunuhan besar-besaran di Dili bulan November 1991. Pihak militer yang melakukan kekejaman itu menyalahkan terjadinya peristiwa tersebut pada orang-orang Timor Timur. Para perwira yang suka berperang sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan hati pikiran (di mana asimilasi merupakan satu bagiannya) tidak berjalan, bahwa orang Timor Timur tidak bisa dipercaya dan mereka menggunakan uang beasiswa yang mereka terima untuk memperluas jaringan perlawanan di Jawa, dan seterusnya. Pandangan bahwa orang Timor Timur adalah apa yang disebut Rut McVey sebagai "penduduk asing", bukan "penduduk yang sesungguhnya" yang bisa dipercaya, tampak menjadi pandangan resmi. Setelah pembunuhan besar-besaran itu, Mario Carrascalao berkata dengan putus asa bahwa semua usaha untuk membujuk rakyat agar menerima integrasi telah gagal. Sekarang ia dibuang ke Rumania sebagai duta besar dan uang untuk beasiswa telah dipangkas.

Carrascalao sedianya akan diganti wakil gubernurnya yang militer, Brigjen A.B. Saridjo dari Jawa. Tetapi pembunuhan besar-besaran itu telah memaksa keputusan mengangkat seorang gubernur putra daerah lagi, Abilio Osario Soares. Komandan militer setempat, Brigjen Theo Syafei mengungkapkan keragu-raguannya yang serius di kalangan militer tentang kesetiaan para pegawai

negeri sipil asal Timor Timur ketika ia menyatakan harapan, agar Soares "mengikis habis orang -orang gila berkepala dua". Apabila orang-orang terbaik Timor Timur tidak dipercaya untuk memegang jabatan tanggung jawab, dalam dua dasawarsa setelah integrasi ini, tak seorang pun dapat menyatakan bahwa asimilasi telah berhasil.

Stagnasi Ekonomi

Kedua, sekalipun uang dari Jakarta mengalir deras, perekonomian Timor Timur tidak memperlihatkan tanda-tanda vitalitas. Aliran uang itu tidak menciptakan pasar lapangan kerja yang diharapkan bagi orang Timor Timur yang berpendidikan – ketika diukur terakhir kali tahun 1989, 66% lulusan sekolah menengah atas menganggur. Orang Timor Timur menghadapi halangan besar berupa kecurigaan ketika mereka mendaftarkan diri untuk memasuki birokrasi atau dunia bisnis. Hubungan perdagangan hanya berlangsung secara ekslusif antara orang-orang luar di luar dan orang-orang luar di dalam Timor Timur.

Ditariknya kembali kebijakan asimilasi – yang disebabkan karena penarikan kembali oleh golongan militer garis keras maupun karena orang Timor Timur semakin merasa tidak ada mobilitas ke atas bagi mereka – akan merupakan satu-satunya kehilangan kesempatan terbesar bagi Indonesia sampai dewasa ini kalau tidak dibalikkan kembali.

Represi dan Banjir Demografi

Sayangnya, ada cara keempat untuk mengatasi suatu gerakan separatis, yaitu mencegah penyelesaian dan dengan demikian memerangkapnya ke dalam suatu jalan buntu. Ini tercapai dengan represi militer, yang biasanya dibarengi dengan membanjirnya imigran dalam jumlah besar dari tempat-tempat lain sehingga mengubah keseimbangan demografis. Nasib golongan Aborigin Australia masuk dalam ingatan saya dalam konteks ini.

Perluasan militerisasi di Timor Timur – oleh para perwira berbaju sipil dan beribu-ribu mata-mata sewaan setempat yang sama banyaknya dengan pasukan garnisun berseragam – merupakan satu-satunya sumber keluhan yang paling terdengar. Mengenai imigrasi, sekurang-kurangnya bagi Irian Jaya terdapat bukti bahwa Jakarta secara sadar melaksanakan pandangan politiknya mengenai program transmigrasi sebagai penipisan demografis dari masyarakat Irian yang separatis. Imigrasi besar-besaran dari orang luar Timor Timur telah berlangsung tanpa campur tangan resmi pemerintah, tetapi dinamika inilah yang sedang terjadi.

Dewasa ini hanya sedikti terdapat gerakan ke arah penyelesaian menurut tiga saluran utama dari apa yang kita gambarkan sebagai separatisme Timor Timur. Timor Timur sedang mengalami jalan buntu. Ini berarti kekuatan yang memotori perlawanan dewasa ini hanya dihadapi dengan represi berkelanjutan dari pada dengan suatu penyelesaian

Jalan mana yang ditempuh akan ditentukan oleh analisis untung rugi politik.

Kekuatirannya ialah bahwa banyak orang dalam pemerintahan Indonesia tampak berpendapat bahwa represi berkelanjutan secara politik tidak begitu mahal dibandingkan penyelesaian. Tetapi dalam persepsi saya, perlawanan Timor Timur adalah jauh lebih kuat dibandingkan perlawanan yang dialami dalam sejarah gerakan separatis lain di Indonesia. Mereka yang mengenal orang-orang Timor Timur semuanya akan berkata 'mereka tidak akan pernah menyerah'.

IV Prospek Bagi Perdamaian

Liku-Liku Politik dalam Negara Otoriter

Jalan buntu jelas tidak dapat diterima. Represi menodai bangsa Indonesia, represi menodai semua orang di luar yang mempunyai urusan penting dengan Indonesia, dan represi menhancurkan orang Timor Timur. Tetapi apakah ada suatu pertanda harapan untuk suatu penyelesaian yang lebih langgeng dan lebih terhormat? Secara khusus, mengingat aspek-aspek tertentu dari masalah itu yang agak bersifat kepala batu, potensi apa yang ada bagi suatu penyelesaian *politik*?

Ketika kita menggambarkan Timor Timur sekarang ini sebagai suatu kasus separatisme efektif, secara tersirat kita bermaksud bahwa titik berat penyelesaian terletak terutama pada Indonesia sendiri. Tetapi kemudian kita dihadapkan dengan sistem politik Indonesia yang bersifat otoriter dan sangat terpusat, yang kadang-kadang dikenal dengan istilah tekhnis 'pemerintahan birokratis', 'otoriterisme birokratis', atau 'korporatisme negara'. Atas dasar pengertian ini keputusan-keputusan politik tidak mencakup sebagian besar penduduk melainkan diambil di lingkungan elit kecil yang memerintah saja.

Pandangan ini mungkin berat sebelah. Pastilah politik lewat parlemen untuk sebagian besar dihambat di Indonesia, dan pers seringkali mendapat kekangan berat. Tetapi legitimasi juga tetap penting di Indonesia. Banyak diantara persaingan antar elit yang mendorong kegiatan

politik diperagakan di depan khalayak. Timor Timur merupakan bagian yang semakin penting dalam kegiatan politik ini disebabkan oleh peran yang dimainkan di dalamnya oleh angkatan bersenjata.

Menjadikan Represi Sesuatu Yang Mahal

Orang-orang luar dapat membantu dengan mencoba mengubah koefisien dalam persamaan harga keuntungan politik: membuat represi berkelanjutan sesuatu yang mahal, dan sebaliknya membuat penyelesaian lebih dapat dilaksanakan. Satu-satunya yang saya tahu bagi orang luar untuk membuat represi secara politik lebih mahal adalah dengan mempublikasikan represi tersebut.

Penggunaan represi untuk menunda perubahan politik tidaklah khas bagi Timor Timur. Hal itu juga berlaku umum di seluruh Indonesia. Penyumbatan internal membuat pihak yang tidak berdaya tidak mampu untuk berseru kepada masyarakat internasional. Kita perlu mengerti otoriterisme ini untuk menghargai bahwa bahkan suatu keadaan minimal seperti penerbitan anti represi yang bertahan lama sudah merupakan komitmen yang mahal terhadap penyelesaian konflik. Bahkan bagi orang-orang luar, harganya dapat mencakup hubungan yang lebih sukar dengan instansi-instansi penerintah dan perusahan-perusahan Indonesia. Berapa besar harga bagi orang yang di dalam, yang menghadapi hukuman penjara yang panjang hanya

karena menyampaikan informasi kepada dunia luar?[25]

Publikasi mengubah para kurban dari obyek menjadi subyek. Kekuatiran yang mendesak di Timor Timur sekarang ini adalah bahwa peristiwa November 1994 akan sekali lagi mendorong militer Indonesia untuk menutup wilayah itu. Hal itu akan berarti turun kembali ke masa-masa suram 1976-1989. Timor Timur membutuhkan kedatangan terus menerus para wartawan, delegasi parlemen, delegasi oikomene, komisaris hak asasi manusia, wisatawan yang berpengetahuan banyak. Wilayah itu membutuhkan kerja sama yang teratur dengan lembaga-lembaga Timor Timur berwenang, seperti misalnya Gereja Katolik, sekolah-sekolah Gereja, Universitas Timor Timur, harian Dili *Suara Timor Timur*, dan LSM-LSM mandiri.

Mendengar Suara Timor Timur

Bagaimana dengan penyelesaian? Menurut pendapat saya, yang jauh lebih penting ketimbang memikirkan resep mengenai suatu penyelesaian tertentu atas jalan buntu pada tahap ini – apakah pemisahan, otonomi, atau asimilasi – adalah dengan mengakui suara rakyat Timor Timur sendiri.

---

[25] Fernando de Araujo bulan Mei 1992 dijatuhi hukuman penjara 9 tahun karena memberikan informasi lewat telepon tentang hak asasi manusia kepada organisasi-organisasi di luar negeri. Ia dituduh berusaha mendapatkan simpati masyarakat internasional atas pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur.

Perdana Menteri Auatralia Witlam tidaklah sendirian ataupun yang terakhir ketika pada tahun 1975 ia memutuskan secara semena-mena tanpa pernah bertanya kepada rakyat Timor Timur, bahwa Timor Timur bukanlah suatu nasion yang dapat hidup terus. Paternalisme semacam itu masih dapat didengar dewasa ini, misalnya ketika Menteri Luar Negeri Australia Gareth Evans menuduh pers Australia "menimbulkan harapan tentang adanya peluang-peluang bagi kemerdekaan Timor Timur". [26] Ini adalah kasus pembunuhan terhadap seorang kurir.

Usul-usul yang diajukan oleh orang Timor Timur perlu ditanggapi lebih jauh serius dari apa adanya. Ini termasuk gagasan referendum yang dikemukakan tanpa mengenal lelah oleh Uskup Carlos Belo, maupun saran-sarannya yang belakangan untuk otonomi. Rencana perdamaian CNMR masih menuntut suatu tanggapan. Di penjara Cipinang Xanana Gusmao telah menjadi Nelson Mandela dari Timor Timur, seorang pemimpin yang sama aktifnya. Analisa dari para cendekiawan Timor Timur seperti Saldanha membutuhkan sidang pembaca yang lebih luas.

Semua gagasan orang-orang Timor Timur berputar di sekitar pikiran yang sangat masuk akal mengenai penyelesaian lewat perundingan terhadap jalan buntu Timor Timur -- pembicaraan yang sungguh-sungguh dengan orang-orang sesungguhnya mengenai masalah-masalah yang sesungguhnya. Ini tentulah merupakan titik awal

[26] Misalnya, *AFP*, 17 Juli 1994.

bagi suatu proses perdamaian. Orang-orang yang mengajukan usul-usul itu semuanya adalah wakil-wakil rakyat Timor Timur yang dapat dipercaya, yang sekarang tersedia untuk diajak berunding. Uskup Belo mewakili kekuatan simbolis dari rasa bermasyarakat rakyat Timor Timur. Xanana Gusmao mewakili perlawanan bersenjata dan klendestein. Kutub terakhir boleh jadi seorang putra Timor Timur yang mengenal sistem Indonesia – terutama bekas Gubernur Mario. Carrascalao. Yang lain-lain boleh jadi seorang akademisi seperti Saldanha atau Armindo Maia, anggota parlemen Salvador Ximenes atau anggota Komisi Nasional Indonesia untuk hak asasi manusia Clementino dos Reis Amaral.

Patner Berunding dari Indonesia

ABRI dan Istana

Siapa kiranya yang dapat menjadi patner di pihak Indonesia bagi para perunding Timor-Timur itu? Kebanyakan analisa menelusuri jejak dinamika dari arena politik Jakarta yang terbatas pada ketegangan antara Istana Kepresidenan dan faksi-faksi tertentu di kalangan Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI). Masalah mendesak diantara dua kutub tradisional dari percaturan politik di kalangan birokrasi Indonesia ini adalah suksesi kepresidenan. Dalam hal biasa hal ini muncul sekali dalam lima tahun (1993, 1998, 2003), tetapi sejalan dengan semakin tuanya Presiden Suharto hal ini selalu semakin mendesak.

Baik ABRI maupun pihak Istana mempunyai taruhan yang cukup besar di Timor Timur. Keduanya mempunyai kepentingan yang jelas untuk mempertahankan *status quo* -- karena alasan-alasan historis, prestise dan ekonomis. ABRI terutama mempunyai pandangan ultra nasionalis, kaku dan memusuhi keanekaragaman politik. Setiap penyelesaian di mana Xanana memainkan peranan penting akan dipandang sebagai kekalahan yang memalukan bagi ABRI, dan beberapa orang perwira mungkin kuatir terhadap tekanan untuk pengadilan kejahatan perang.

Tetapi keduanya juga mengalami tekanan untuk merundingkan sesuatu penyelesaian langgeng. ABRI maklum bahwa legitimasinya di seluruh Indonesia menjadi terancam setiap kali ABRI melakukan kekejaman terhadap hak-hak asasi manusia yang dipublikasikan, di Timor Timur atau di tempat-tempat lain. Bagi suatu angkatan bersenjata yang sangat berpolitik seperti ABRI yang ingin meraih jabatan kepresidenan, legitimasi *memang* penting. Mungkin inilah yang ada di belakang percakapan intern ABRI baru-baru ini dengan Xanana Gusmao dan Uskup Belo, yang menghasilkan, berlawanan dengan pernyataan-pernyataan kepada umum, yaitu bukan hanya satu melainkan dua bahkan tiga laporan mengenai kemungkinan untuk memberikan kepada Timor Timur suatu bentuk otonomi. Dalam hal ini orang teringat pada skenario Jalur Gaza. Kelemahan dari pendekatan ini ialah ABRI tidak berminat pada jaminan internasional atau pun pada proses politik terbuka.

Di lain pihak Istana kepresidenan jauh menyadari rintangan dari masyarakat dunia bahwa Timor Timur masih belum sepenuhnya menerima Indonesia. Hal ini disadari dengan kuat selama pertemuan-pertemuan APEC baru-baru ini. Agaknya apa yang disebut dengan pertemuan-pertemuan 'perujukan London', di mana diadakan dua pertemuan (Desember 1993 dan akhir Sepetember 1994), adalah prakarsa dari keluarga presiden saja, dengan melangkahi ABRI dan (anehnya) Departemen Luar Negeri RI. Pembicaraan itu melibatkan Lopez da Cruz, Duta Besar Keliling Indonesia yang ditugaskan memajukan kasus Timor Timur, dan Abilio Araujo, seorang anggota pembangkang dari perlawanan Timor Timur di luar negeri yang dikeluarkan dari CNMR karena mengumumkan perundingan tanpa berkonsultasi dengan CNMR.

Masalah dengan pertemuan London ialah bahwa pertemuan hampir tidak melibatkan orang-orang yang dapat dipercaya, dan bahwa acara sangat terbatas. Baik Xanana maupun Uskup Belo menolak pertemuan-pertemuan itu. Lopez da Cruz tampaknya mengakui secara pribadi bahwa pembicaraan-pembicaraan itu merupakan siasat memecah belah gerakan perlawanan. Di lain pihak, kalau Jakarta ingin meyakinkan Sekretaris Jendral PBB bahwa pembicaraan-pembicaraan ini sungguh-sungguh, maka Jakarta harus memberikan isi yang sebenarnya kepada pembicaraan-pembicaraan tersebut. Tanda-tanda ke arah itu termasuk hadirnya utusan Sekretaris Jendral, Tamrat Samuel, pada pembicaraan terakhir, dan permintaan terselubung

untuk membebaskan Xanana diungkapkan dalam komunike (pernyataan) akhir.

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Proses ketiga yang dapat menawarkan suatu harapan ialah serangkaian pertemuan antara Menteri Luar Negeri Portugal dan Indonesia yang disponsori oleh Sekretaris Jendral PBB. Sejauh ini tiga pertemuan telah diselenggarakan. Pertemuan berikutnya dijadwalkan bulan Januari 1995. Kemajuan dalam pertemuan-pertemaun ini seret, tetapi suatu langkah kecil telah tercapai berupa persetujuan masing-masing pihak untuk bertemu dengan seorang wakil Timor TImur yang bertentangan dengan pandangannya, sebagai suatu 'langkah pembentukan kepercayaan'. Dalam konteks ini Jose Ramos Horta dari CNMR bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas di New York bulan Oktober lalu, suatu pertemuan yang pada tingkat tertentu berarti pengakuan formal Indonesia terhadap CNMR, FRETILIN dan UDT. Suatu aspek lain dari keterlibatan PBB adalah kunjungan berturut-turut oleh para pelapor khusus (*Spesial Rapporteur*) ke Timor Timur untuk menyelidiki pelanggaran hak-hak asasi manusia. Beberapa laporan telah diumumkan -- laporan oleh Bacre Waly N'Daiye, yang berkunjung ke Timor Timur bulan Juli lalu, telah terbit bulan Desember dan berisi rekomendasi-rekomendasi penting.[27]

[27] Laporan ini telah diterjemahkan dan dipublikasikan sebagai bahan studi hak asasi manusia oleh Lembaga

Gerakan Demokrasi Indonesia

Akhirnya, kita harus melihat gerakan rakyat untuk demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia. Sejak pembunuhan besar-besaran di Dili bulan November 1991, bagian-bagian penting dari gerakan itu telah menjadi mengenal Timor Timur dengan baik, dan cukup berani menyoroti nasinalisme Indonesia yang tidak kritis. Sejauh ini yang paling terkemuka diantara mereka adalah ilmuwan DR. George Junus Aditjondro, yang sekarang secara teratur diwawancarai tentang Timor Timur oleh pers utama Indonesia. Sebelumnya dia dikenal sebagai wartawan dan pecinta lingkungan, ia sendiri menganggap tentangan terhadap 'petualangan' Indonesia di Timor Timur sebagai analog dengan gerakan perdamaian anti perang Vietnam di Amerika Serikat selama perang Vietnam. Baik Xanana maupun Belo sering digambarkan dalam pers Indonesia dengan kata-kata pujian, jelas sebagai simbol dari perlawanan berprinsip terhadap suatu negara opresif.

Sekalipun tingkat keamanan politik berbeda-beda, masing-masing proses ini dengan caranya sendiri mewakili jalan potensial untuk suatu penyelesaian.

Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Komite Bersama untuk Masyarakat Timor Timur.(ed.)

V. Kesimpulan

Analisa kita telah memilih untuk memandang Timor Timur sebagai berkaitan erat dengan Indonesia sekarang ini. Menjadi jelas bahwa perlawanan terhadap negara nasion Indonesia, sekali pun sambil menelusuri awal mulanya pada invasi bulan Desember 1975, dewasa ini masih terus dihangatkan oleh faktor-faktor masa kini, baik sosial maupun ekonomi. Suatu rasa bermasyarakat yang kuat, yang diperantarai oleh Gereja Katolik, telah terbentuk oleh teror meluas yang terus menerus, oleh marginalisasi ekonomi, dan oleh kegagalan untuk memberikan mobilitas ke atas yang murni dalam lingkungan perekonomian Indonesia bagi kelompok elit wilayah itu.

Tetapi penyelesaian dari perlawanan separatis berdasarkan salah satu dari tiga jalur dasar di atas – pemisahan, otonomi dan asimilasi – telah dihambat. Separatisme bersenjata sangat tidak mungkin untuk berhasil. Suatu derajat otonomi daerah mungkin sedang dipertimbangkan oleh sebagian birokrasi tetapi secara terbuka telah ditolak dengan keras.

Dan kebijakan hati pikiran seperti misalnya program beasiswa telah dipotong oleh adanya kecurigaan akan tidak adanya kesetiaan orang Timor Timur. Alih-alih menuju penyelesaian, separartisme Timor Timur dihadapi dengan penindasan berkelanjutan.

Hasil jalan buntu yang kita dapatkan sekarang berkaitan dengan sistem politik Indonesia yang otoriter, yang kemampuannya dalam menyelesaikan

konflik sangat rendah. Satu implikasi penting mengenai hal ini ialah bahwa resiko bagi semua orang yang terlibat dalam proses perdamaian menjadi jauh lebih tinggi dibanding dengan orang-orang yang tidak terlibat di dalamnya. Advokasi untuk perdamaian di Timor Timur adalah berharga tapi berbahaya.

Alih-alih mengetengahkan suatu jalan penyelesaian tertentu, tulisan ini menyerankan beberapa cara di mana suatu proses dapat menerobos situasi jalan buntu yang tertekan. Salah satu diantaranya adalah publisitas Indonesia dan internasional untuk pandangan orang Timor Timur sendiri. Pengungkapan akan menembus teror yang memencilkan mereka, dan mengubah mereka dari obyek menjadi subyek.

Berikutnya, konsisten dengan analisa dasarnya, tulisan ini berusaha mencari patner-patner Indonesia yang mungkin dalam suatu proses perundingan. Tulisan ini mengidentifikasikan empat proses yang berlaku:

1. Proses intern Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,
2. Proses internasional yang disponsori oleh Istana,
3. Proses Departeman Luar Negeri yang disponsori oleh Sekretaris Jendral PBB dan
4. Gerakan kerakyatan Indonesia untuk demokrasi yang lebih luas yang mencakup suatu perhatian terhadap Timor Timur.

Beberapa dalam diantara proses-proses ini memberi harapan lebih besar dibanding yang lain-lain – memang tidak ada yang memberi tempat khusus kepada orang Timor Timur sendiri – tetapi

proses ini tidak perlu bersifat eksklusif terhadap yang lain. Harapan-harapan terbesar akan adanya terobosan sekarang terpusat pada suatu bentuk otonomi untuk Timor Timur. Tetapi bahkan untuk mencapainya akan membutuhkan usaha jauh lebih besar untuk memecah siklus represi dan membangkitkan kemauan politik (*political will*).***

Tentang Gerry van Klinken

Sejak Maret 1996 Gerry menggantikan Pat Walsh menjadi editor *Inside Indonesia*, sebuah buletin terbitan Australia tentang Indonesia. Kedatangannya ke Indonesia untuk pertama kali tahun 1977, sebagai seorang petualang (*hippy trial*) bersama Helena rekannya. Setelah itu akhir tahun 1988 ia kembali ke Indonesia untuk mengajar fisika di Universitas Satya Wacana, Salatiga selama 7 tahun. Awal tahun ini dia menyelesaikan Ph.D-nya tentang sejarah Indonesia di Universitas Griffith, Brisbane, di mana dia juga tinggal bersama keluarga. "Keterlibatan" Gerry untuk "akhirnya" mempehatikan dan lalu menulis masalah Timor Timur, kiranya tak terhindarkan. Selama 7 tahun mengajar di Satya Wacana, mau tidak mau dia akan dengar dan lihat bahwa Timor Timur adalah masalah dan lahan pengabdiannya sebagai seorang intelektual. Apalagi di situ ada intelektual Indonesia terkemuka tentang masalah Timor Timur, George Junus Aditjondro.

UNIVERSITAS KRISTEN
SATYA WACANA
1956

elsam